

**KOMUNIKASI
POLITIK
ELITE
GOLKAR**
DALAM REKONSILIASI
DUALISME KEPEMIMPINAN
PARTAI



Jurusan Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Redaksi: Gedung Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Lt 2. Ruang Jurusan Manajemen Dakwah
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788 Fax : 0227810788
E-mail : md@uinsgd.ac.id
Website : <http://md.uinsgd.ac.id>

ISBN 978-623-6524-04-6 (PDF)



KOMUNIKASI POLITIK
ELITE GOLKAR DALAM REKONSILIASI
DUALISME KEPEMIMPINAN PARTAI

KOMUNIKASI POLITIK ELITE GOLKAR DALAM REKONSILIASI DUALISME KEPEMIMPINAN PARTAI
Hamzah Turmudi
Khoiruddin Muchtar

Hamzah Turmudi | Khoiruddin Muchtar

**KOMUNIKASI
POLITIK
ELITE
GOLKAR**
DALAM REKONSILIASI
DUALISME KEPEMIMPINAN
PARTAI



**KOMUNIKASI POLITIK ELITE GOLKAR
DALAM REKONSILIASI DUALISME KEPEMIMPINAN PARTAI**

**Hamzah Turmudi
Khoirudin Muchtar**



UIN

**Jurusan Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Komunikasi Politik Elite Golkar Dalam Rekonsiliasi Dualisme Kepemimpinan Partai

Penulis :

Hamzah Turmudi
Khoirudin Muchtar

ISBN: 978-623-6524-04-6

Editor:

Asep Iwan Setiawan
Rohmanur Aziz

Penerbit:

Jurusan Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:

Gedung Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Lt 2. Ruang Jurusan Manajemen Dakwah
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail : md@uinsgd.ac.id
Website : <http://md.uinsgd.ac.id>

Cetakan pertama, Januari 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat merampungkan penulisan naskah disertasi ini. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah sukses menjadi mediator penyampaian pesan-pesan kebenaran Allah kepada umat manusia. Semoga peneliti tetap konsisten mengikuti suri tauladannya. Amien.

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan terhadap fenomena Partai Golkar yang selama ini berusaha menjalankan proses demokratisasi di internal partai, upaya itu berimplikasi terhadap kebebasan para kader untuk berpendapat, berargumentasi dan mengambil sikap dalam berbagai kebijakan partai, sehingga tidak ada lagi figure yang berkuasa secara dominan. Fenomena tersebut mengarah kepada perbendaan pendapat dan pandangan yang sulit untuk dikompromikan, fenomena itu juga menjadi bagian dari penyebab munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dan kedua kubu tersebut memiliki pendukung masing-masing.

Partai Golkar pada kenyataannya tidak pernah terbelah menjadi dua kubu seperti sekarang ini, sebelumnya Golkar adalah partai yang cukup solid dan pandai mengemas berbagai persoalan internalnya, walaupun ada kader yang merasa dikecewakan, namun tidak kemudian membelah partai menjadi dua, tapi kader yang dikecewakan tersebut kemudian mendirikan partai sendiri, katakanalah seperti Surya Paloh yang merasa kecewa setelah kalah

bersaing dengan Aburizal Bakrie pada Munas Golkar di Pekanbaru, kemudian Ia mendirikan Partai Nasdem.

Fenomena ini mendorong para sesepuh Partai Golkar untuk memprakarsai rekonsiliasi antara dua kubu Aburizal Bakri dan Agung Laksono. Peneliti ingin mengetahui bagaimanakah komunikasi politik yang dilakukan para elite Golkar dalam proses rekonsiliasi tersebut.

Peneliti sadar sepenuhnya, bahwa selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada para pimpinan Partai Golkar mulai tingkat Pusat sampai daerah yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan informasi dan mendapatkan data. Begitu juga kepada Bapak Dekan dan para Wadek, teman-teman Dosen dan Pegawai TU di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis, sehingga terwujudnya hasil penelitian ini.

Peneliti menyadari, dengan selesainya penulisan laporan ini bukan berarti berakhirnya perbaikan, karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dan semoga semua yang membantu terselesaikannya disertasi ini dibalas oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Amien.

Bandung, 13 Januari 2021
Penulis

Hamzah Turmudi
Khoiruddin Muchtar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang1
- 1.2. Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran5
- 1.3. Kajian Teoritis9
- 1.4. Konsep Dasar Komunikasi Politik11
- 1.5. Unsur-Unsur Komunikasi Politik.....18
- 1.6. Komunikasi Politik dan Partai Politik22
- 1.7. Pencitraan Partai24

BAB II. GAMBARAN UMUM PARTAI GOLKAR

- 2.1. Struktur Organisasi dan Pengurus Partai Golkar30
- 2.2. Paradigma Baru Partai Golkar36
- 2.3. Visi Misi Partai Golkar38
- 2.4. Doktrin Karya kekaryaan40
- 2.5. Platform Partai Golkar42

BAB III. MOTIVASI REKONSILIASI PARTAI GOLKAR

- 3.1. Mempertahankan Keutuhan Partai45
- 3.2. Kepentingan Masa Depan50
- 3.3. Rasa Memiliki Terhadap Partai58

BAB IV. KONFLIK DAN REKONSILIASI PARTAI GOLKAR

- 4.1. Latar Belakang Munculnya Konflik62

4.2. Fenomena Penyebab Terjadinya Konflik	68
4.2.1. Kekalahan Pemilu	70
4.2.2. Campur Tangan Pemerintah	79
4.2.3. Tuntutan Perubahan Partai	83
4.2.4. Rekonsiliasi Sebelum Munas	85
4.3. Munas Sebagai Jalan Rekonsiliasi	98
BAB V. EKSISTENSI PARTAI GOLKAR PASCA MUNASLUB	
5.1. Konsolidasi Pasca Munaslub	110
5.2. Prospek Partai Golkar	117
BAB VI. PENUTUP	
6.1. Simpulan	128
6.2. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasca Reformasi tahun 1998 merupakan awal kehidupan baru bagi Partai Golkar. Pada masa ini, Golkar harus hidup mandiri tanpa kekuatan birokrasi dan ABRI seperti masa-masa sebelumnya, Golkar juga dituntut untuk lebih bersikap demokratis, sesuai dengan tuntutan reformasi. Semenjak terpilihnya Akbar Tanjung sebagai ketua umum tahun 1988 sampai sekarang, Golkar terus berbenah mencari jatidiri sesuai dengan alam reformasi, sebagai upaya untuk menyahuti keinginan masyarakat. Partai Golkar memiliki cita-cita untuk bangun kembali menjadi partai besar yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia.

Golkar terus berjuang membangun citra positif, dengan menawarkan pembaharuan mulai dari visi, misi, dan platform partai yang bernilai demokratis, kesetaraan, kerakyatan dan kebangsaan yang plural. Pembaruan itu sendiri didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai Golkar sendiri, yakni jatidiri dan watak Golkar sebagai kekuatan pembaru. “*Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya*”, merupakan etos atau semangat pembaruan pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar Partai Golkar sejak kelahirannya.

Pembaruan ini dimulai dari internal partai, terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai Golkar. Langkah-langkah pembaruan kelembagaan tersebut diikuti dengan diwujudkannya prinsip kedaulatan di tangan anggota, yang berarti mekanisme pengambilan setiap keputusan organisasi dilakukan secara lebih terbuka dan demokratis. Melalui mekanisme yang demokratis ini, maka terbukalah peluang yang sama bagi kader-kader untuk memimpin partai, karena memang dalam prespektif demokrasi kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua, sehingga tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu.

Demokratisasi di tubuh Partai Golkar berakibat pada kebebasan para kader untuk berpendapat, berargumentasi dan mengambil sikap dalam berbagai kebijakan partai, sehingga tidak ada lagi figure yang berkuasa secara dominan. Fenomena tersebut mengarah kepada perbendaan pendapat dan pandangan yang sulit untuk dikompromikan, fenomena itu juga menjadi bagian dari penyebab munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dan kedua kubu tersebut memiliki pendukung masing-masing.

Partai Golkar pada kenyataannya tidak pernah terbelah menjadi dua kubu seperti sekarang ini, sebelumnya Golkar adalah partai yang cukup solid dan pandai mengemas berbagai persoalan

internalnya, walaupun ada kader yang merasa dikecewakan, namun tidak kemudian membelah partai menjadi dua, tapi kader yang dikecewakan tersebut kemudian mendirikan partai sendiri, katakanlah seperti Surya Paloh yang merasa kecewa setelah kalah bersaing dengan Aburizal Bakrie pada Munas Golkar di Pekanbaru, kemudian Ia mendirikan Partai Nasdem.

Partai Golkar yang sedang mengalami keterpurukan mulai Pemilu tahun 2009 dan disusul dengan merosotnya perolehan suara pada Pemilu tahun 2014, seharusnya lebih solid dan terus melakukan konsolidasi di internal partai, namun sebaliknya, malah muncul dualisme kepemimpinan partai. Kondisi ini tentu menghawatirkan para elit, terutama para senior Golkar.

Munculnya dualisme kepemimpinan partai ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi elite Golkar, mereka berupaya mempersatukan kembali perpecahan dengan melakukan komunikasi politik, mencari de-eskalasi konflik, yaitu mengidentifikasi pokok persoalan yang memicu konflik, dan mengidentifikasi kunci-kunci permasalahan yang akan dapat mempersatukan dualisme tersebut. Negosiasi politik juga terus dilakukan antara dua pemimpin tersebut. Kepengurusan Golkar di tingkat daerah juga terus melakukan konsolidasi dan pembinaan dengan tujuan utama yaitu mempersatukan kembali Partai Golkar. Mereka berkeyakinan bahwa, eksistensi Partai Golkar akan tetap terjaga manakala di internal partainya tetap solid.

Komunikasi politik elite sebagai upaya menjaga eksistensi partai dalam proses rekonsiliasi dualism kepemimpinan Golkar, merupakan Fenomena yang akan menjadi fokus peneltian kami. Penelitian ini juga ingin menemukan bagaimanakah model komunikasi politik yang dilakukan elite Partai Golkar dalam proses rekonsiliasi tersebut.

Berdasar latar belakang penelitian tersebut, maka fokus kajian ini berupaya mengungkap tentang, bagaimanakah komunikasi politik elite Golkar dalam mempertahankan eksistensi partai, pasca Rekonsiliasi Dualisme Kepemimpinan Golkar dengan mengamati proses rekonsiliasi dualisme kepemimpinan Partai Golkar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran, mengenai landasan dan alasan komunikasi politik elite Golkar dalam melakukan rekonsiliasi sebagai upaya menjaga eksistensi partai, memperoleh gambaran tentang komunikasi politik elite Golkar dalam proses terjadinya dualisme kepemimpinan dan apa yang menjadi penyebab munculnya konflik, serta bagaimana rekonsiliasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan Munaslub 2016, dan untuk memperoleh gambaran tentang upaya-upaya yang dilakukan elite Golkar dalam mempertahankan eksistensi partai pasca Munaslub 2016.

Kegunaan secara akademik dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi,

utamanya adalah komunikasi politik terkait dengan upaya-upaya elite Golkar dalam mempertahankan eksistensi partai pasca rekonsiliasi dualisme kepemimpinan. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjelaskan pola komunikasi yang dilakukan elit partai dalam melakukan negosiasi, konsolidasi dan memperbaiki citra partai, sehingga mampu mempertahankan eksistensi Partai Golkar.

1.2. Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran

Kajian penelitian mengenai partai Golkar pernah dilakukan oleh Alief Sudewo (2006), berjudul *Partai Golkar di Era Reformasi: Strategi dalam Menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2004*. penelitian ini menjelaskan peran dan eksistensi Partai Golkar di era reformasi, serta menjelaskan tentang strategi Partai Golkar dalam pemilu Calon legislatif 2004, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan terinya menggunakan teori partai politik dan teori pelebagaan, dari penelitan ini ditemukan bahwa, strategi Golkar dalam menghadapi pemilu legislative 2004 adalah dengan melakukan pembenahan internal organisasi yang meliputi perubahan struktur dan konsolidasi organisasi.

Heriyandi Roni (2006), meneliti tentang *Demokratisasi internal partai Golkar pasca orde baru (1998-2004)*. Penelitian ini merupakan disertasi di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2006. Penemuannya menjelaskan bahwa, penentuan ketua umum

dalam masa transisi di Munaslub 98, Munas VII 2004 dan penentuan calon presiden melalui konvensi, menggambarkan adanya proses demokratisasi di internal Golkar. Kasus pemilihan tersebut memberikan gambaran yang kompleks tentang power struggle antar faksi di tingkat elit Golkar. Peta faksi-faksi tersebut di setiap kasus berubah-ubah. Studi kasus ini menurut Roni memperlihatkan bahwa, kelompok kepentingan pragmatis kekuasaan yang memenangkan power-power struggle tersebut. Proses pelaksanaan konvensi partai meningkatkan citra (building image) Partai Golkar pada pemilu 2004, sehingga memperoleh kemenangan, setelah mengalami kemerosotan perolehan suara pada pemilu 1999.

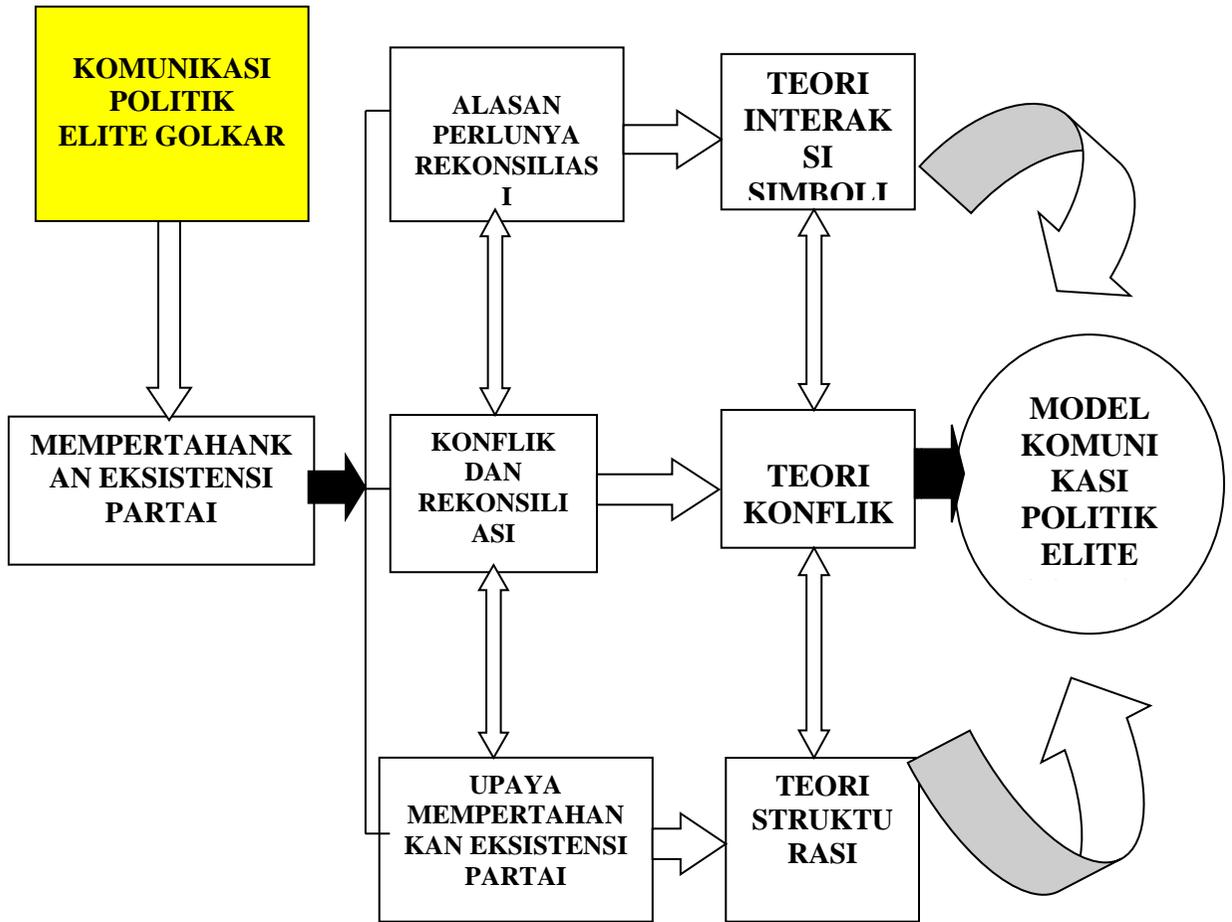
Akbat Tandjung (2007), penelitiannya berjudul, *Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Temuannya menjelaskan bahwa eksistensi Partai Golkar ditengah era transisi, karena proses perubahan tersebut berjalan secara gradual tidak revolusioner, sehingga memberikan kesempatan kepada Golkar untuk mempertahankan hidupnya, naiknya BJ. Habibie yang berasal dari Golkar sebagai presiden pengganti Soeharto memberi kesempatan kepada partai pendukung rezim Soeharto tersebut untuk melakukan konsolidasi organisasi, guna mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat menghancurkan eksistensinya.

Dijelaskan juga, kuatnya pengaruh dan jaringan Golkar di pemerintahan, DPR, MPR dan masyarakat menjadi modal

penting sebagai jaring pengaman bagi Golkar untuk tidak jatuh dan bubar bersamaan dengan jatuhnya rezim orde baru sebagai mitranya. Modal politik penting yang dimiliki Golkar adalah infrastruktur dan jaringan, nilai-nilai yang telah dibangun Golkar dan SDM yang sudah berpengalaman dalam politik dan organisasi, modal tersebut juga dianggap sebagai kekuatan yang menyebabkan Golkar tetap survive.

Dirk Tomsa (2008), melakukan penelitian untuk pengajuan Disertasinya dengan membahas tentang, *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The pos Soeharto-era*. Penelitian ini menjelaskan tentang eksistensi Partai Golkar dalam menjaga posisi politiknya yang dominan pada era multi partai pasca orde baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teori institusionalisasi, dari penelitiannya ditemukan, bahwa Partai Golkar pasca reformasi ternyata tidak mengalami kesulitan dalam mempertahankan eksistensi dan posisi politiknya, ini dikarenakan Partai Golkar memperoleh warisan hegemoni kelembagaan pada masa lalu (Tomsa, 2008: 180). Selain itu menurut Tomsa, kemampuan Golkar dalam menjaga eksistensinya dikarenakan partai ini memiliki kelembagaan yang kuat, kadernya tersebar di berbagai birokrasi dan organisasi kemasyarakatan serta mempunyai akses sampai ke akar rumput.

Kerangka Pemikiran



1.3. Kajian Teoritis

1.3.1. Teori Interaksi Simbolik

Interaksi simbolik merupakan teori yang berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Interaksi simbolik menurut Effendy (1989: 352) adalah suatu paham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran di mana sebelumnya pada diri masing-masing yang terlibat, berlangsung proses internalisasi.

Interaksi simbolik adalah segala hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik benda mati, maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik sebagai pesan verbal maupun perilaku non verbal, dan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau simbol (objek) tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah atau kelompok komunitas masyarakat tertentu.

Perspektif teori interaksi simbolik menyatakan bahwa, orang-orang sebagai peserta komunikasi (komunikator) bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramal. Dengan kata lain, teori ini berasumsi bahwa manusia memiliki kekuatan dalam berkomunikasi dan lebih aktif. Kualitas *simbolik* secara implisit terkandung dalam istilah *interaksional* jauh berbeda dengan interaksi biasa yang ditandai

dengan pertukaran stimulus respons. Dalam konteks ini, Blumer, menekankan kepada tiga premis yang menjadi dasar utama model ini, yaitu: *Pertama*, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya (simbol verbal, simbol nonverbal, lingkungan fisik). *Kedua*, makna itu berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. *Ketiga*, makna diciptakan, dipertahankan dan diubah lewat proses penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya (Mulyana, 2004: 160).

1.3.2. Teori Konflik

Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural. Teori ini melihat konflik dan pertikaian dalam sistem sosial. Teori konflik melihat berbagai elemen masyarakat sebagai penyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan.

Menurut teori ini berpandangan, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya merupakan hasil dari pemaksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di atasnya. Terciptanya rekonsiliasi antara dua kubu di tubuh Partai Golkar diperlukan peran perantara yang memiliki pengaruh dan kekuatan yang lebih dari pihak-pihak yang sedang bertikai, senior-senior atau yang disebut Dewan Pertimbangan Golkar sebenarnya paling diharapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Menurut Dahrendorf (dalam Ritzer dan Goodman, 204: 153), masyarakat mempunyai dua wajah yaitu konflik dan konsensus, masyarakat tidak akan ada tanpa konflik dan konsensus yang

menjadi syarat dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain. Konflik dalam suatu organisasi merupakan peristiwa yang wajar, hanya saja bagaimana suatu organisasi mengemas konflik tersebut sehingga tidak menjadikan organisasi terganggu eksistensinya. Konflik antar pengurus di Partai Golkar juga sudah sering terjadi, namun saat ini konflik tersebut sudah menjadikan Golkar terbelah.

Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas, posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, akan tetapi dalam posisi. Sumber struktur konflik harus dicari dalam tatanan sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukan (Ritzer dan Goodman, 204: 154). Kedua kubu sama-sama mengklaim memiliki otoritas dan posisi yang kuat dengan alasan rasionalisasi menurut persepektif masing-masing.

1.4. Konsep Dasar Komunikasi Politik

Pemahaman tentang komunikasi politik perlu diawali dari pemahaman tentang; komunikasi, politik, dan komunikasi politik. 1) *Konsep Dasar Komunikasi*. Menurut Effendy (1986: 11) berasal dari bahasa Inggris yaitu; "*communication*" berasal dari kata latin "*communicatio*", dan bersumber dari kata "*communis*" yang berarti sama, maksudnya adalah sama makna, maka komunikasi akan terjadi dan berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan. Sedangkan Nimmo (2000: 6) memandang komunikasi sebagai proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia

(yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol. Menurut keduanya, pada dasarnya komunikasi adalah merupakan suatu proses interaksi sosial untuk memperoleh kesamaan makna dalam memberikan interpretasi terhadap simbol-simbol.

Komunikasi didefinisikan juga sebagai proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasi makna dalam lingkungan mereka (West dan Turner, 2008: 5). Paradigma baru Golkar dianggap sebagai hasil rumusan kader Golkar setelah menghadapi proses reformasi, kemudian difahami sebagai simbol yang secara terus menerus mengalami interpretasi sesuai dengan konteks perkembangan jamannya.

Pendapat lain tentang komunikasi disampaikan oleh Gabriel Almond dan G. Bingham Powell (1976: 167), mereka menyatakan bahwa semua bentuk interaksi manusia melibatkan komunikasi. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah ikut mempengaruhi struktur komunikasi dalam masyarakat. Almond membedakan empat struktur komunikasi. *Pertama*, kontak tatap muka informal yang muncul terpisah dari struktur masyarakat. *Kedua*, struktur sosial tradisional seperti hubungan keluarga dan keagamaan. *Ketiga*, struktur politik “output” (keluaran) seperti legislatif dan birokrasi. Keempat, struktur “input” (masukan) termasuk misalnya serikat buruh dan kelompok kepentingan dan partai-partai politik. *Kelima*, adalah media massa.

2) *Konsep Dasar Politik*. Politik, diartikan oleh Koentjaraningrat dkk (1984: 151) sebagai suatu sistem pengaturan pembagian kekuasaan dari penguatan wewenang dalam masyarakat. Nimmo (2000: 8) menambahkan bahwa, Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang terkait dengan kekuasaan dan pemegang kekuasaan. Pembicaraan tentang politik tidak pernah bisa dipisahkan dengan perebutan dan pengaturan kekuasaan, baik itu perebutan jabatan ataupun perebutan pengaruh. Senada dengan itu, Amir Santoso (1993: 1), berpendapat bahwa politik adalah urusan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana cara memperolehnya. Persoalan siapa memperoleh lebih banyak dari yang lain kerap menimbulkan konflik. Begitu juga bagaimana cara yang digunakan untuk memperolehnya, sering menimbulkan konflik. Itulah hakekat politik yang mengandung makna sebagai arena berkompetisi. Sebagai arena kompetisi, politik akan senantiasa menciptakan golongan yang lebih kuat dan memperoleh yang lebih banyak dari yang lain. Politik dimana dan kapanpun adalah sebuah persaingan. Tidak pernah ada politik tanpa persaingan, dan tidak pernah ada politik yang mengalah atau memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Yahya Muhaimin, (1993: 17) memberikan pendapat lebih bijak, meskipun sepakat dengan Santoso bahwa politik merupakan arena persaingan untuk mendapat kekuasaan, namun menurutnya, dengan demokrasi diharapkan proses persaingan itu dapat berjalan secara adil. Konsep ini tidak mengisyaratkan terpenuhinya kepentingan semua pihak

menjadi pemenang, tetapi sungguhpun ada yang kalah, namun semuanya berlangsung secara adil dan fair.

P.Eric Laouw dalam bukunya "*The Media and Political Process*", mencoba memberikan penjelasan bahwa di tengah kelangkaan sumber daya yang ada, masyarakat akan berusaha mendapatkan akses untuk memperoleh sumber daya yang terbatas dalam memenuhi tuntutan hidupnya. Jika masyarakat tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dalam memenuhi tuntutan hidupnya, diperlukan keputusan alokasi sumber daya.

Program selanjutnya akan ditentukan siapa yang akan memperoleh apa, bagaimana sumber daya yang terbatas tersebut dikelola dengan baik, siapa yang akan diberi wewenang untuk mengambil keputusan, karena setiap keputusan akan mengakibatkan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah, untuk itu diperlukan mekanisme agar semua pihak siap menerima berbagai keputusan yang sudah ditentukan. Proses pengambilan keputusan tersebut di dalamnya akan terjadi perebutan, baik antarpribadi ataupun kelompok untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi kunci dalam pengambilan keputusan, perebutan juga akan terjadi dalam penentuan nilai-nilai pondasi organisasi dan alokasi sumber daya. Unsur yang paling penting dan mendasar dalam politik adalah sebuah proses pengambilan keputusan, yaitu perebutan untuk memperoleh akses pada posisi pengambilan keputusan, dan proses kewenangan untuk menjalankan keputusan-keputusan tersebut. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman, bahwa politik

mengandung sejumlah konsep kenegaraan yaitu: kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), dan pembagian atau alokasi sumber daya (Cangara, 2009: 27-28).

Pendapat lain dikemukakan oleh Budiarjo (2005: 1.7) yang menyatakan bahwa, politik adalah semua kegiatan yang melibatkan berbagai usaha untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. Meskipun perjuangan untuk merebut kekuasaan, namun pada umumnya dilandasi dengan keinginan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat. Politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, diperlukan kebijaksanaan umum, yang mengatur alokasi sumber daya yang ada, untuk melaksanakan kebijakan tersebut, perlu ada kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai, baik untuk membina kerjasama, maupun penyelesaian konflik yang bisa timbul setiap saat.

3) *Konsep Dasar Komunikasi Politik*. Setelah dibahas tentang komunikasi dan politik, selanjutnya adalah tentang komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari budaya politik dan sosialisasi politik. Bila kita berbicara tentang budaya politik dan sosialisasi politik, maka kita berbicara pula tentang komunikasi politik, sehingga komunikasi politik merupakan fungsi sosialisasi dan budaya politik. Dalam analisis sistem politik, maka yang menjadi perhatian adalah struktur-

struktur yang melaksanakan fungsi politik, dan bagaimana komunikasi tersebut dilaksanakan.

Struktur yang melakukan komunikasi politik dapat dibedakan ke dalam lima macam. *Pertama*, komunikasi tatap muka yang bersifat informal, yang merupakan bentuk utama komunikasi. *Kedua*, struktur sosial non-politis, seperti keluarga, kelompok ekonomi atau keagamaan. *Ketiga*, struktur input politik, seperti partai politik, organisasi kepentingan, atau masyarakat sipil. *Keempat*, struktur output politik, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan birokrasi. *Kelima*, media massa, seperti misalnya, surat kabar harian mingguan, radio dan televisi. Kelima macam struktur yang melaksanakan fungsi komunikasi ini mempunyai peran sendiri-sendiri dan sulit untuk mengatakan bahwa yang satu lebih penting dari yang lain (Budiardjo, 2005: 4.28).

Komunikasi politik menurut Lynda Lee Kaid adalah sebuah studi interdisipliner yang terbangun atas berbagai disiplin ilmu, yaitu: komunikasi, politik, sosiologi, psikologi, sejarah, retorika dan sebagainya. (2004: xiii). sedangkan Denton dan Woodward dalam McNair (2003: 3), memberikan definisi komunikasi politik dengan menyatakan bahwa ” *political communication as pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state rewards or punishes)*”.

Jadi menurut mereka, komunikasi politik membahas tentang alokasi sumber daya publik, kewenangan formal, yaitu kekuasaan untuk pembuatan hukum yang berkaitan dengan undang-undang dan aturan-aturan dalam lingkup legislatif ataupun eksekutif, serta sanksi-sanksi yang akan diberikan, apakah dalam bentuk hadiah atau denda. Berbeda dengan itu, Nimmo (2008: 9), memandang komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya. (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Sedangkan Kantaprawira (1984: 14) menjelaskan fungsi komunikasi politik untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intern golongan, instansi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah

Penjelasan Nimmo ini lebih simpel, yang memandang komunikasi politik adalah segala kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan masalah-masalah politik. Sedangkan kantaprawira lebih memahami komunikasi politik sebagai jembatan penghubung, bagi kepentingan berbagai elemen masyarakat secara umum dengan pemerintah terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan politik.

Sementara itu Soemarno (2002: 1.5) berusaha merumuskan pengertian komunikasi politik, sebagai suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat

symbol-simbol yang berarti. Pengertian tersebut menunjukkan kepada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan atau sistem nilai, baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat, agar terwujud jalinan komunikasi antara penguasa dengan masyarakat yang mengarah kepada kesamaan makna. Senada dengan pandangan tersebut Alwi Dahlan seperti yang dikutip Cangara (2009: 350), mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Pengertian komunikasi politik dalam definisi ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

1.5. Unsur-Unsur Komunikasi Politik

Komunikasi politik dalam prosesnya tidak terlepas dari unsur-unsur komunikasi pada umumnya. Komunikasi politik berlangsung dalam suatu proses penyampaian pesan-pesan yang berasal dari sumber, selaku komunikator yang memprakarsai komunikasi kepada khalayak dengan menggunakan suatu media. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar terjadinya aktivitas komunikasi politik dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan implementasi paradigma baru Partai Golkar.

Pada tataran konsep, komunikasi politik terbagi menjadi empat bagian yaitu; komunikator komunikasi politik, pesan, saluran atau media komunikasi politik, dan khalayak. *Pertama*, komunikator politik. Menurut Nimmo (2000: 28) siapapun diantara kita mempunyai potensi untuk menjadi komunikator politik, namun sedikit sekali yang mempunyai profesi dan kebiasaan menjadi komunikator politik. Komunikator massa sebagai gate keeper mempunyai kedudukan dan pengaruh penting di dalam masyarakat dan komunikator massa berlaku juga bagi komunikator politik. Komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Paradigma baru Golkar dalam sosialisasinya tidak hanya mengandalkan para fungsionaris partai, akan tetapi mereka juga mendekati para tokoh masyarakat agar mau membantu mensosialisasikan paradigma baru Golkar.

Nimmo (2000: 29) mengidentifikasi komunikator utama dalam politik ini menjadi tiga yaitu: politikus, profesional dan aktifis. Pernyataan ini menunjukkan bahwa, Politikus tidak bisa sendirian melakukan tindakan komunikasi politik, ada banyak unsur komunikator lain yang memiliki peran signifikan dalam proses komunikasi politik yaitu profesional, aktifis, bahkan tidak kalah pentingnya adalah para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di lingkungannya.

Kedua, Pembicaraan politik, di dalamnya berisi pesan-pesan politik yang disampaikan dengan pembicaraan, bahkan orang yang tidak berbicara politikpun dibicarakan dalam politik, begitu

dominannya pembicaraan dalam politik, sehingga politik juga tidak bisa lepas dari kepentingannya terhadap media dan sebaliknya, media juga punya kepentingan terhadap berita politik. Pembicaraan dalam politik berkisar tentang kekuasaan, pengaruh dan otoritas, serta dibicarakan juga tentang konflik. Melalui pembicaraan, para komunikator politik menyelesaikan perselisihan-perselisihan mereka dengan menyusun pembendaharaan kata tentang asumsi, makna, perngharapan dan komitmen bersama.

Ketiga, saluran atau media komunikasi politik, secara umum yang dapat dipergunakan dalam penyebarluasan pesan, yaitu saluran komunikasi personal dan saluran komunikasi non-personal atau biasa disebut saluran komunikasi melalui media massa. Kedua jenis saluran tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saluran ini baik yang bersifat langsung perorangan maupun kelompok, lebih persuasif dibandingkan dengan saluran media massa. Penyampaian pesan melalui saluran komunikasi personal dapat dilakukan secara langsung kepada khalayak yang dituju, bersifat pribadi dan manusiawi. Penyampaian pesan melalui saluran komunikasi personal dapat dilakukan secara lebih rinci dan fleksibel disesuaikan dengan kondisi khalayak, keterlibatan khalayak dalam proses komunikasi cukup tinggi, pihak komunikator sumber dapat langsung mengetahui reaksi tanggapan dari khalayak, dan pihak komunikastor dapat segera memberikan penjelasan apabila ada kesalah pahaman dari pihak khalayak atas pesan yang disampaikannya (Sendjaja, 2002: 9.16).

Jenis saluran yang kedua adalah saluran melalui media massa, saluran ini punya daya jangkauan khalayak yang lebih luas, serta kemampuan penyampaian pesannya yang cepat, sehingga pantas apabila media massa selalu menjadi ajang perhatian dan perebutan para pemilik modal, karena media massa merupakan lahan bisnis yang sangat menguntungkan, terutama yang berada di negara maju dan demokratis. Disisi lain pemerintahpun mempunyai kepentingan terhadap media massa ini. Keikutsertaan masyarakat dalam dalam mengelola media massa sangat bergantung kepada sistem politik dimana media massa itu berada.

Menurut Soemarno (2002: 4.14) fungsi media massa dalam komunikasi politik yang tampak adalah sebagai berikut: (1) media massa dalam melakukan fungsi sebagai sumber informasi politik selalu menyajikan dan menayangkan peristiwa-peristiwa politik di berbagai belahan dunia termasuk kegiatan aktor-aktor politik dengan sikap dan perilaku politiknya. (2) fungsi partisipasi, maknanya bahwa sajian pesan-pesan komunikasi politik harus mampu menggugah masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. (3) sosialisasi dan pendidikan politik, artinya media massa harus mampu mensosialisasikan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. (4) mengembangkan budaya politik, yaitu membentuk pola perilaku yang memberi warna dominan terhadap karakter suatu bangsa. (5) fungsi integrasi bangsa, media massa harus mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran integralistik dalam upaya mempersatukan keutuhan bangsa.

Keempat, Khalayak politik, merupakan faktor penentu keberhasilan komunikasi, karena standar keberhasilan komunikasi yang dilakukan adalah dapat diterima, difahami dan mendapatkan tanggapan positif sesuai dengan harapan komunikator. Untuk mendapatkan hasil seperti ini tidaklah mudah, khalayak bukanlah individu-individu yang pasif, akan tetapi mereka aktif dan selektif. Terhadap isi pesan yang sama, bisa jadi akan terdapat perbedaan-perbedaan mengenai perhatian, pemahaman, tanggapan, serta tindakan yang timbul di kalangan khalayak (Sendjaja, 2002: 9.24)

Ketika pesan-pesan politik itu disampaikan, komunikator perlu memahami karakteristik khalayaknya, tidak semua strata masyarakat dapat didekati dengan satu model komunikasi, karena khalayak yang dihadapi terdiri dari beraneka ragam latar belakang budaya dan pendidikan yang berbeda. Selain pesan-pesan politik yang disampaikan, khalayak juga akan memperhatikan kredibilitas komunikator, sehingga komunikator yang baik adalah yang selalu menjaga performannya di hadapan khalayak.

1.6. Komunikasi Politik dan Partai Politik

Partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang relatif sama. Mereka sepakat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik, mempunyai sifat, tujuan dan cara yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti gerakan politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Melihat peranannya sebagai organisasi kemasyarakatan, partai politik mempunyai

beberapa fungsi, fungsi-fungsi partai politik tersebut adalah sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sebagai alat penengah pertikaian. Partai politik di negara-negara komunis mempunyai fungsi-fungsi berbeda dengan fungsi-fungsi tersebut. Partai-partai politik di negara-negara totaliter berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesatuan dan keseragaman, sebagai satu-satunya mobilisator massa menuju tujuan idiologi partai (Budiardjo, 2005: 5.36)

Selain itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Beranjak dari pengertian-pengertian partai politik tersebut ada tiga prinsip dasar dari partai politik, *Pertama adalah Partai sebagai koalisi*, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi didalamnya terdapat faksi-faksi. Partai Golkar misalnya, didalamnya ada Kosgoro, MKGR, dan Korpri (sebelum tahun 1999).

Kedua, partai sebagai organisasi, untuk menjadi partai yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan, maka partai politik harus dikelola, dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi

wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok.

Ketiga, partai sebagai pembuat kebijakan, partai politik mendukung secara kongkrit terhadap kader-kadernya yang duduk di jajaran eksekutif (pemerintahan), partai politik juga memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian dimana kader menduduki posisinya (diadaptasi dari Cangara, 2009: 209-210)

Memperhatikan terhadap pengertian, prinsip, dan fungsi-fungsi partai, maka sejatinya ketiga hal tersebut syarat dengan muatan-muatan aspek komunikasi, sehingga sejalan dengan fungsi komunikasi politik itu sendiri, yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik, memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris dan pendukung partai politik, serta mendidik masyarakat dengan pemberian informasi dan sosialisasi tentang cara-cara melakukan pemilihan umum sebagai sarana penyampaian hak suara.

1.7. Pencitraan Partai

Komunikasi politik salah satu tujuannya adalah membangun citra positif bagi khalayak. Citra politik terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Citra politik berkaitan juga dengan pembentukan pendapat umum, karena pada

dasarnya pendapat umum terbangun melalui citra politik, sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekwensi kognitif dari komunikasi politik (Arifin, 2006: 1).

Dinyatakan pula oleh Roberts (1977), bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan, dan citra itulah yang mempengaruhi pendapat atau perilaku khalayak (Arifin, 2006:1)

Menurut Kenneth E. Bouilding, citra merupakan serangkaian pengetahuan dan pengalaman serta perasaan serta penilaian yang diorganisasikan dalam sistem kognisi manusia; atau pengetahuan pribadi yang sangat diyakini keberadaannya. Menurut Bouding, citra itu timbul karena penerimaan pesan, dan sampai pada tingkat tertentu pesan tersebut bisa merubah citranya, dengan berubah citra, maka pola perilaku seseorang akan berubah. (Winangsih-Syam, 1994: 103-104)

Citra merupakan kesan, perasaan dan gambaran publik terhadap suatu organisasi atau perusahaan, sehingga citra positif perlu diciptakan dengan sengaja dan dipelihara sepanjang organisasi itu ingin tetap eksis di tengah-tengah publiknya, karena citra positif adalah aset penting bagi suatu organisasi dalam mempertahankan kehidupannya. Partai, sebagai organisasi politik sangat memerlukan terhadap terciptanya citra positif partai, citra positif dapat ditunjukkan melalui penyikapan terhadap berbagai peristiwa politik dengan

membawa aspirasi politik yang sesuai dengan tuntutan publik atau konstituennya.

Sikap adalah kecenderungan bertindak , berpersepsi, befikir, dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap ini juga dapat diperteguh atau diubah. Dalam proses komunikasi, orang-orang itu terlibat aktif dalam sikap, motif, opini, maupun ingatan terhadap pengalaman terdahulu. Perubahan sikap dalam berkomunikasi terjadi karena adanya interaksi yang dinamis (Winangsih-Syam, 2009: 110).

Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu organisasi atau perusahaan di benak publiknya dibutuhkan adanya suatu penelitian. Melalui penelitian organisasi atau perusahaan dapat mengetahui secara pasti sikap publik terhadap organisasinya, mengetahui apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh publiknya (Soemirat dan Ardianto, 2005: 116)

Pembentukan citra positif organisasi partai yang perlu diketahui pertama kali adalah dengan membaca dan mengamati kecenderungan-kecenderungan dan keinginan publik atau

konstituen, untuk kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh untuk menampung aspirasi konstituen. Organisasi partai politik selanjutnya memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menentukan sikap politiknya. Pencitraan yang dimaksud dalam konsep penelitian ini untuk menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh para ketua umum Golkar dalam membangun citra positif partai, dengan harapan akan mendapat simpati dan kepercayaan masyarakat.

Membahas tentang pencitraan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai public relations (Humas), karena hasil dari upaya public relations adalah pembentukan citra positif. Pencitraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh simpati dan kepercayaan publik, sehingga publik memberikan penilaian positif terhadap suatu organisasi atau perusahaan yang muaranya adalah menggaet pembeli atau dalam partai politik adalah menarik pemilih agar memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Politik pemasaran, istilah ini berasal dari pemasaran sektor bisnis yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat atau kelompok sasaran dalam situasi yang kompetitif. Kemudian ditransfer ke politik, yang berarti aplikasi pemasaran komersial dalam bidang politik, ini mengarah kepada desain produk yang berorientasi pasar, misalnya politik partai yang sesuai dengan preferensi pemilih. Dari sudut pandang pemasaran, PR adalah bagian dari pemasaran (seperti iklan dll), PR juga berbeda dengan propaganda, propaganda sejak perang dunia ke I khususnya di

kalangan Nazi Jerman menghasilkan konotasi negatif dari segi konsep. Sejak itu propaganda menunjukkan arti parsial, manipulatif, dan bentuk komunikasi persuasif pendusta dan penuh kepura-puraan. Sedangkan PR berusaha menyajikan objektivitas, kejujuran, dan pesan informatif (Kaid & Holtz-Bacha, 2008: 677)

Pada saat ini, banyak sekali organisasi atau perusahaan dan orang-orang yang mengelolanya sangat sensitif menghadapi publik-publik mereka yang sangat kritis. Dalam suatu penelitian terhadap seratus top eksekutif, lebih dari 50% menganggap “penting sekali untuk memelihara publik yang baik”. Sekarang ini banyak sekali organisasi atau perusahaan memahami sekali perlunya memberi perhatian yang cukup untuk membangun suatu citra yang menguntungkan bagi suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya melepaskan diri terhadap terbentuknya suatu kesan publik negatif. Dengan perkataan lain citra organisasi atau perusahaan adalah *fragile commodity* (komoditi yang rapuh atau mudah pecah). Namun, kebanyakan perusahaan juga meyakini bahwa, citra organisasi atau perusahaan yang positif adalah esensial, sukses berkelanjutan dan dalam jangka panjang (Seitel dalam Soemirat dan Ardianto, 2005: 111).

Para politikus atau pemimpin politik sangat berkepentingan dalam pembentukan citra politik melalui komunikasi politik dalam usaha menciptakan stabilitas sosial dengan memenuhi tuntutan rakyat. Politikus dan pemimpin partai politik berusaha menciptakan dan mempertahankan tindakan politik yang yang membangkitkan

citra yang memuaskan, sehingga dukungan pendapat umum dapat diperoleh dari rakyat sebagai khalayak komunikasi politik.

Citra politik berkaitan dengan sosialisasi politik, karena citra politik terbentuk melalui proses pembelajaran politik baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. Citra politik mencakup beberapa hal, yaitu: (1) seluruh pengetahuan politik seseorang baik benar atau salah; (2) semua preferensi (afeksi) yang melekat kepada tahap tertentu dari peristiwa politik yang menarik; (3) semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang mungkin terjadi jika ia berperilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalam situasi tersebut (Arifin, 2006: 3-4).

Citra politik akan selalu berubah sesuai dengan berubahnya pengetahuan dan pengalaman politik seseorang, serta situasi politik yang selalu berkembang. Sosialisasi politik terbangun melalui proses belajar secara terus-menerus, melalui pengalaman sosialisasi politik, seseorang mengembangkan kepercayaan dan harapan sesuai dengan cita-cita politik yang relevan. Sosialisasi politik dapat mendorong terbentuknya citra politik pada individu, sehingga dapat mendorong seseorang melakukan peran-peran partisipasi politik seperti, kampanye, pemilu, kegiatan partai ataupun diskusi politik.

BAB II

GAMBARAN UMUM PARTAI GOLKAR

2.1. Struktur Organisasi dan Pengurus Partai Golkar

Merujuk kepada Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009, Anggaran Dasar Partai Golkar pada BAB VIII tentang Struktur Organisasi serta Wewenang dan Kewajiban Pimpinan, dinyatakan bahwa, Struktur Organisasi Partai Golkar terdiri atas tingkat Pusat, tingkat Propinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan. Masing-masing dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Propinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan.

Masing-masing tingkatan kepengurusan Partai Golkar memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan sesuai dengan levelnya. Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif. Dewan Pimpinan Pusat berwenang menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar, mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, mengesahkan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah

Provinsi, Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar serta memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar, mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi, mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi Partai Golkar, memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi.

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar, mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan, menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan.

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban, melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar, memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.

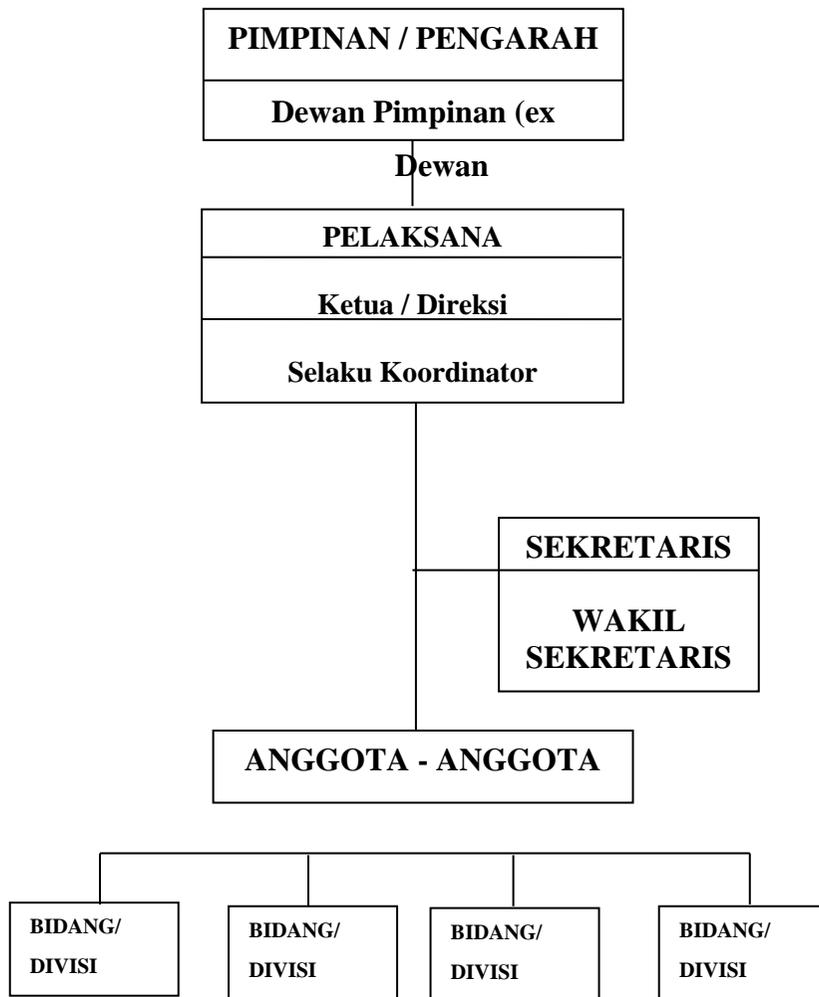
Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan. Pimpinan Kecamatan berwenang menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar, mengesahkan Komposisi Personalia

Dewan Pertimbangan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan.

Pimpinan Kecamatan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar, memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan.

Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.

Pimpinan desa/kelurahan atau sebutan lain berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa/Kelurahan.



Gambar: 3.1.
 Struktur Organisasi Badan dan Lembaga di Lingkungan Partai
 Golkar
 (Kumpulan PO, Juklak dan Keputusan DPP Partai Golkar 2009-
 2015)

**SUSUNAN PENGURUS DPP PARTAI GOLKAR
 PERIODE 2016-2019**

Dewan Pembina Golkar

Ketua: Aburizal Bakrie

Wakil: Theo L Sambuga, Sharif Cicip Soetardjo dan Ade Komarudin

Sekretaris: Fadel Muhammad

Anggota:

- Priyo Budi Santoso
- Rully Hasrul Azwar
- Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto)
- Marzuki Darusman
- Hafiz Zawawi

Dewan Kehormatan Golkar

Ketua: BJ Habibie

Wakil: Akbar Tandjung, Luhut Pandjaitan

Anggota:

- Ginandjar Kartasasmita
- Abdul Latief

Dewan Pakar

Ketua: Agung Laksono

Wakil: Pontjo Sutowo, Hajriyanto Y Thohari, Siti Hediati Hariyadi, Mahyudin

Sekretaris: Firman Soebagyo

Pengurus Harian

Ketua Umum: Setya Novanto

Ketua Harian: Nurdin Halid

Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Kepartaian: Kahar Muzakir

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa III: Sigit Haryo Wibisono

Korbid Polhukam: Yorrys Raweyai

Korbid Pemenangan Pemilu (PP) Jawa Sumatera: Nusron Wahid

Korbid PP II Ahmad Hidayat Mus, Kesra Roem Kono, Korbid

Ekonomi: Airlangga Hartarto.

Korbid Pertahanan dan Keamanan: Indra Bambang Utoyo

Korbid Luar Negeri: Meutya Hafid

Korbid Pengabdian Masyarakat: Agus Gumiwang

Korbid SDA: Satya Widya Yudha

Korbid Perdagangan dan Industri: Erwin Aksa
Korbid Kemaritiman: Kapten Anton Sihombing
Kabid Otonomi Daerah: Aziz Syamsudin
Kabid Pembangunan Daerah: Zainudin Amali.
Kabid Kebudayaan Tantowi Yahya, Kabid Hukum dan HAM Rudi
Alfonso, Kabid Media Nurul Arifin,
Kabid PP Sumatera: Andi Sinulingga
Kabid PP Jakarta Jabar: Agung Gunandjar
Kabid PP Jateng-DIY: Bambang Soesatyo
Sekjen: Idrus Marham
Bendahara Umum: Robert J Kardinal
(News.rakyatku.com, 2019)

2.2. Paradigma Baru Partai Golkar

Paradigma Baru Partai Golkar ini berisi pokok-pokok doktrin, visi, misi, dan platform politik. Di dalam perumusan paradigma baru ini ada terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan melalui perubahan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai Golkar untuk tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya kekaryaannya.

Pembaruan ini disamping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai Golkar yang mandirian, demokratis, kuat, solid, berakar dan responsif. Pembaruan paradigma itu sendiri didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai Golkar sendiri, yakni jati diri dan watak Golkar sebagai kekuatan pembaru. Sebagaimana disebutkan pada poin keempat dari *Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya*, etos atau semangat pembaruan pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar Partai Golkar sejak kelahirannya. Fitrah inilah yang

mendorong dilakukannya pembaruan ini. Dengan demikian, pembaruan paradigma ini merupakan pengejawantahan belaka dari fitrah tersebut.

Paradigma baru Partai Golkar ini telah mulai diwujudkan melalui pembaruan internal, terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai Golkar.

Langkah-langkah pembaruan kelembagaan tersebut juga diikuti dengan diwujudkannya prinsip kedaulatan ditangan anggota. Yaitu mekanisme pengambilan setiap keputusan organisasi dilakukan secara lebih terbuka, demokratis, dari bawah (bottom-up), dan dengan pemungutan suara secara langsung. Melalui mekanisme yang demokratis ini maka terbukalah peluang bagi kader-kader untuk memimpin Partai karena memang dalam perspektif demokrasi kesempatan dan peluang perlu disediakan untuk semua, sehingga tidak terjadi pemusatan pandangan pada pesona figur tunggal yang mengarah pada kultus individu.

Implikasi lain dari serangkaian pembaruan tersebut adalah sangat berarti, yakni Partai Golkar menjadi benar-benar mandiri dan mampu mewujudkan tegaknya asas kedaulatan ditangan anggota sebagai salah satu prinsip utama dari Partai yang modern, demokratis, dan mengakar. Partai Golkar bertumpu hanya pada kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan di luar dirinya, dan selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan

organisasional secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar atau golongan manapun.

2.3. Visi Misi Partai Golkar

Partai Golkar mempunyai visi untuk berjuang mewujudkan Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya, serta disiplin yang tinggi.

Visi tersebut menjadi tekad Partai Golkar untuk mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis.

Visi Partai Golkar dalam bidang ekonomi adalah ekonomi kerakyatan, atas dasar keyakinan bahwa hanya sistem perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa negara dan bangsa Indonesia terjerembab kedalam krisis

ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi ternyata semu dan sangat rapuh terhadap guncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental ekonomi kita.

Golkar dalam visinya juga mecita-citakan penguatan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau keterampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu (etos intelektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan religius dikalangan masyarakat.

Misi perjuangan Partai Golkar yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. *Kedua*, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. *Ketiga*, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

2.4. Doktrin Karya Kekaryaan

Munculnya paradigma baru Golkar, tidak merubah doktrin Partai Golkar sebelumnya, tetap sebagai kelanjutan dari Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai Golkar tetap berpegang pada doktrin karya kekaryaan, yaitu Karya Siaga Gatra Praja, tetapi dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan jaman.

Doktrin karya kekaryaan menjadikan Partai Golkar selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi aliran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai Golkar adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya.

Dengan doktrin karya kekaryaannya Partai Golkar berorientasi pada program (program oriented) dan atau pemecahan masalah (problem solving), bukan berorientasi pada aliran atau ideologi (ideology oriented). Dengan perspektif ini ingin ditegaskan bahwa Golkar tidak sependapat dilakukannya pengelompokan politik berdasarkan primordialisme dan sektarianisme. Pembelahan masyarakat berdasarkan ideologi atau aliran-aliran dikhawatirkan akan melahirkan konflik-konflik ideologi yang bermuara pada pertentangan, perpecahan, dan masalah disintegrasi bangsa.

Dengan orientasi ini maka masyarakat tidak akan terjebak dalam pertentangan atau konflik ideologi yang tidak perlu, melainkan berorientasi pada karya untuk membangun bangsa. Bagi Partai Golkar karya yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat adalah lebih penting daripada ide atau gagasan semata. Karya kekaryaannya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan menyeluruh, untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat. Karya kekaryaannya adalah juga amal shalih dalam pengertian yang luas sebagaimana yang diajarkan agama-agama.

Sebutan Doktrin Golongan Karya adalah '**Karya Siaga Gatra Praja**' yang menunjukkan surya-sengkala dimana Organisasi Golongan Karya lahir, yaitu tahun 1964:

Karya = 4

Siaga = 6

Gatra = 9

Praja = 1

Sekaligus pernyataan ini menyatakan derap langkah serta tekad Golongan Karya untuk senantiasa siap sedia membangun Negara (Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009).

2.5. Platform Partai Golkar

Platform yang dimaksud disini adalah landasan tempat berpijak, yaitu wawasan-wawasan yang menjadi acuan dan arah dari mana dan kemana perjuangan Partai Golkar hendak menuju. Platform merupakan sikap dasar yang merupakan kristalisasi dari pemahaman, pengalaman dan kesadaran historis Partai Golkar dalam menyertai bangsa membangun masa depan.

Partai Golkar berpijak pada landasan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari pijakan ini, maka Partai Golkar bewawasan kebangsaan, yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu.

Kemajemukan atau pluralisme tidak dipandang sebagai kelemahan atau beban, melainkan justru sebagai potensi atau kekuatan yang harus dihimpun secara sinergis dan dikembangkannya sehingga menjadi kekuatan nasional yang kuat dan besar. Partai Golkar mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan serta senantiasa siap berkompetisi secara sehat. Golkar sendiri dalam platform-nya memantapkan diri sebagai partai yang nonaliran atau nonsektarian.

Partai Golkar menjunjung tinggi ajaran agama yang dalam gerak langkahnya senantiasa mendasarkan pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama. Etika dan moralitas adalah saripati dari ajaran agama dan buah dari keberagaman itu sendiri, dengan demikian seluruh langkah perjuangan senantiasa dilandasi nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan agama.

Partai Golkar adalah Partai yang demokratis yang memiliki komitmen pada demokrasi. Dalam masyarakat demokratis dan terbuka, maka hanya Partai yang demokratis dan terbuka pula yang akan mendapatkan dukungan rakyat. Partai Golkar adalah Partai Moderat yang senantiasa mengambil posisi tengah dan menempuh garis moderasi. Partai Golkar tidak akan pernah bersikap ekstrim, baik dulu, kini, maupun mendatang. Sebagai Partai moderat Partai Golkar akan tetap konsisten mengembangkan wawasan tengahan dan keseimbangan. Sikap tengahan atau moderat akan menghindarkan Partai Golkar dari kemungkinan terjebak pada pilihan-pilihan yang bersifat pemutlakan nilai.

Partai Golkar memandang peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan nasional yang utama. Perjuangan politik Partai Golkar bermuara pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin. Dalam kaitan ini Partai Golkar memandang politik sebagai instrumen dan manajemen untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, adil dan makmur. Peningkatan kesejahteraan itu diwujudkan dalam bentuk antara lain

peningkatan taraf hidup dan kecerdasan rakyat (Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009).

BAB III

MOTIVASI REKONSILIASI PARTAI GOLKAR

3.1. Mempertahankan Keutuhan Partai

Dewan Pertimbangan Partai Golkar berupaya mengambil langkah-langkah untuk menjembatani konflik yang terjadi di tubuh Golkar antara kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan kubu Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono. Tindakan tersebut dilakukan untuk demi menjaga keutuhan partai. Para sesepuh Partai Golkar menginginkan konflik tersebut segera diatasi tidak berlarut-larut dan menggantung, karena masih banyak agenda-agenda yang harus dipersiapkan menuju kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2019. Sebagai upaya mendukung pencarian solusi tersebut, maka semua pihak harus dapat menahan diri dan dapat duduk bersama untuk melakukan dialog. (Tandjung, wordpress.com, 2014).

Para elite Golkar menghendaki agar konflik elite Partai Golkar tidak sampai melebar hingga ke tingkat DPD I dan DPD II, karena bisa membahayakan keutuhan partai tersebut. Akan sangat berbahaya bila ada yang berupaya membenturkan antara loyalis Aburizal Bakrie dengan loyalis Agung Laksono di daerah. Selain itu, akan berbahaya pula bila kubu Agung Laksono melakukan upaya membuang loyalis kubu ARB dan begitu juga sebaliknya. Gaya politik saling memecat dan menyingkirkan diyakini tidak akan menyelesaikan persoalan namun justru semakin memperkeruh

kondisi di Golkar. Semua komponen di Partai Golkar menghendaki untuk menjaga persatuan, agar bias kembali merebut nomor satu dalam Pemilu mendatang.

Keinginan dan tekad untuk menjaga keutuhan partai juga dilakukan oleh masing-masing calon, seperti halnya yang dilakukan oleh Aziz Syamsuddin dan Syahrul Yasin Limpo yang melakukan kesepakatan memperbaiki citra partai dan menjaga keutuhan Golkar. Kedua kandidat tersebut berkomitmen mengutamakan persatuan Partai Golkar, dan menganggap setelah lebih setahun partai beringin dilanda konflik internal, maka sudah saatnyalah momentum Munaslub menjadi ajang konsolidasi untuk kembali membesarkan Partai Golkar.

Persoalan ketua umum menurut Syamsuddin, bukanlah hal utama yang akan dicapai di Munaslub Golkar. Sebab siapapun yang terpilih, tentulah merupakan kader terbaik Partai Golkar, mereka memiliki visi dan misi yang sama untuk membesarkan Partai Golkar dan membantu pemerintahan Jokowi-JK untuk bersama-sama membangun bangsa, mereka sepakat untuk merangkul semua faksi-faksi dan semua calon ketua umum yang ada nanti untuk masuk dalam kepengurusan Golkar, Seluruh mengajak berkoalisi menyukseskan Munaslub Golkar. Sehingga siapapun yang menang akan saling mendukung dalam kepengurusan Golkar (Syamsuddin, bisnisjakarta.co.id. 2016).

Keputusan rapat Pleno DPP Partai Golkar hasil penggabungan kepengurusan Golkar Bali dan Ancol menjadi pintu

masuk bagi penyelesaian akhir dari konflik internal. Ajang Munaslub dituntut harus berjalan secara demokratis, jujur dan bersih serta tidak ada jejal menjejal dalam pencalonan ketua umum.

Selain ada keharusan tidak saling menjejal, yang tidak kalah pentingnya yaitu pemilik suara dalam Munaslub dapat memilih sosok ketua umum yang terbebas dari penggiringan, tekanan, dan intimidasi dari siapapun terhadap pemilik suara, karena para elite Golkar menginginkan Munaslub dapat berjalan dengan sehat dan demokratis (Sirajuddin, cnn.indonesia.com. 2016)

Barisan Muda Partai Golkar berharap agar dalam Munaslub bisa menghasilkan sosok ketua umum yang tidak bermasalah secara hukum dan diterima baik oleh publik atau masyarakat luas serta mencerminkan regenerasi dalam tubuh Partai Golkar. Mereka mengharapkan ketua umum terpilih harus menjadi magnet keutuhan Partai Golkar dan bisa mengakomodasi semua potensi serta mampu mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Para kader Golkar menghendaki kepemimpinan di tingkat pusat dengan semangat rekonsiliatif, yaitu dengan cara mengakomodasi semua potensi kader yang terlibat konflik, serta menempatkan kader-kader muda partai pada posisi strategis dalam struktur kepemimpinan.

Demi mencapai keutuhan Partai Golkar, ada juga calon yang mengundurkan diri seperti halnya MS Hidayat, yang tidak ingin melihat Partai Golkar retak dan pecah lantaran mementingkan ego dan kepentingan pribadi dalam meraih kekuasaan.

Saya tidak ingin Partai Golkar ini retak dan pecah lantaran mementingkan ego dan kepentingan pribadi dalam meraih kekuasaan (MS Hidayat antaranews.com 2016)

Hidayat berharap pelaksanaan Munas IX Golkar akan berjalan aman, lancar, sehat, demokratis dan fair. Munas diharapkan menjadi momentum para kader dan kekuatan Golkar kembali bersatu. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diharapkan bisa mengembalikan citra Partai Golkar di mata masyarakat. Alih-alih citra Partai Golkar ini sempat terpuruk karena konflik internal yang menderanya. Penyelesaian konflik dan penyatuan kembali melalui Munaslub adalah momentum untuk menumbuhkan harapan baru kepada masyarakat. Harapan baru itu akan ditentukan oleh fungsionaris Partai Golkar sendiri apakah bisa memperoleh legitimasi politik baru di mata public atau sebaliknya.

Munaslub kali ini akan menjadi tolak ukur untuk memperoleh legitimasi dan penilaian, maka munaslub ini harus memnuhi dan mencerminkan empat hal dalam pelaksanaannya. *Pertama*, Munaslub harus menghasilkan konsensus baru. Konsensus yang lahir atas semangat rekonsiliasi dan terbangunnya kebersamaan kembali yang didasari oleh kebesaran jiwa dan kejujuran dari semua pihak yang bertikai selama ini, tidak ada lagi kubu-kubuan. Situasi itu, harus diikuti dengan adanya kompromi-kompromi politik selama proses persiapan maupun saat Munaslub dilaksanakan, khususnya pada penetapan panitia dan peserta Munas. Orientasinya hanya untuk mempertahankan keutuhan partai.

Kedua, Munas harus melahirkan komitmen baru yang mengedepankan kepentingan partai di atas segala kepentingan, apalagi kepentingan kelompok atau orang per orang. Lebih dari itu, juga harus ada komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang terjadi dalam mengelola organisasi selama ini. Cara-cara kepemimpinan yang otoriter dan oligarkis harus menjadi koreksi. Harus pula ada komitmen baru untuk menghilangkan praktik money politics, transaksional, dan intimidatif dalam kehidupan berpartai.

Ketiga, Munaslub harus melahirkan konsep baru dalam menata organisasi. Penegasan visi baru partai yang menempatkan Partai Golkar menjadi partai terbuka, dan aspiratif menjadi agenda penting di dalam Munas. Penting pula adanya peningkatan kemampuan mengelola seluruh sumber daya organisasi partai secara modern, yang diikuti dengan daya inovasi, kreativitas, dan penuh dengan gagasan. Model konvensi pada pemilihan capres, yang secara orisinal adalah milik Golkar, harus ditetapkan menjadi model baku dalam AD/ART.

Keempat, Munaslub kali ini harus melahirkan generasi kepemimpinan baru. Kepemimpinan yang lebih *fresh*, muda, energik, dan bebas konflik. Kepemimpinan yang memiliki karakter kuat dan tidak semata mengandalkan kekuatan uang. Kepemimpinan dan kepengurusan ke depan juga harus diisi dengan kader-kader yang lahir berdasarkan merit system, dari sistem itu akan muncul kader yang memiliki *track record* dan pengalaman organisasi yang tinggi dan tentu sudah memenuhi unsur PD2LT atau Prestasi,

Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela seperti yang tertera di dalam AD/ART.

3.2. Kepentingan Masa Depan.

Golkar merupakan partai besar yang sudah cukup tua, mengakar dan telah menghasilkan banyak kader yang tersebar ke berbagai partai. Golkar juga memiliki nilai tawar yang tinggi, dan banyak orang yang memiliki kepentingan dengan partai ini. Eksistensi Golkar merupakan harapan bagi para kader Golkar sendiri, karena akan berkaitan dengan kepentingan masa depan kader itu sendiri maupun untuk kepentingan masa depan masyarakat, bangsa dan Negara ini.

Dualism kepemimpinan Golkar merupakan ancaman terhadap eksistensi Golkar, karena akan mengganggu terhadap kinerja partai dan tentu konstituen juga akan menjadi gamang untuk menentukan dukungan dan pilihan terhadap partai Golkar. Salah satu jalan adalah Golkar harus kembali menjadi satu dan rekonsiliasi tidak bias ditawarkan lagi. Akbar Tandjung pernah menyatakan bahwa untuk menyatukan kembali partai Golkar adalah dengan jalan Munas rekonsiliasi, dan ini harus segera dilaksanakan agar Golkar tidak semakin terpuruk akibat kisruh berkepanjangan. (CNN Indonesia, 2015).

Rekonsiliasi Partai Golkar merupakan agenda mendesak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Energi kader Partai Golkar dikerahkan untuk menyiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), didasari keinginan untuk mengakhiri konflik antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Jika tidak dilakukan

segera, konflik yang berlarut-larut ini dikhawatirkan akan menciptakan kebuntuan fungsi partai dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019.

Namun sayang, semangat besar ini terganggu dengan kepentingan beberapa elit yang tetap menonjolkan kepentingan untuk mempertahankan status quo. Hingga Partai Golkar tidak bisa menetapkan pelaksanaan Munaslub secara pasti. Fokus elit Golkar berubah pada pembentukan kepengurusan rekonsiliasi setelah adanya putusan Mahkamah Agung Februari lalu yang memenangkan kubu Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

Kepengurusan rekonsiliasi itu jelas untuk mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali dan kepengurusan Munas di Ancol, dengan Basis kepengurusan mengikuti kepengurusan Munas Bali. Kubu Agung Laksono mengakui adanya penggabungan ini dan mulai mengakui kepengurusan rekonsiliasi. peluang untuk menggugurkan Munaslub sangat besar, demi kepentingan para elit mempertahankan kekuasaan.

Pelaksanaan Munaslub adalah tergantung sepenuhnya pada pembentukan Kepengurusan Rekonsiliasi. Kepengurusan Rekonsiliasi kemudian akan diserahkan diserahkan ke Menteri Hukum dan HAM untuk disahkan. Setelah kepengurusan rekonsiliasi yang berbasis hasil Munas Bali itu disahkan baru digelar Rapimnas. Forum Rapimnas inilah yang akan menentukan nasib Munaslub. Upaya membatalkan Munaslub adalah langkah mundur bagi Partai Golkar, apalagi agenda tersebut telah diamanatkan dalam

rekomendasi hasil Rapimnas Golkar sebelumnya pada Januari. Selain itu, Munaslub bukan sekedar upaya menyelesaikan konflik dengan cara transaksional dan kompromi politik, tetapi jauh lebih dari itu, pembaharuan di internal tubuh Golkar sendiri.

Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada lagi peluang untuk membatalkan Munaslub termasuk penundaan pelaksanaan Munas yang diwacanakan akan diselenggarakan pada April 2016 menjadi akhir Mei 2016. Munaslub harus terlaksana demi untuk mengembalikan citra Partai Golkar di mata masyarakat. Citra Partai Berlambang Pohon Beringin ini sempat terpuruk karena konflik internal yang sudah lebih dari satu tahun. Penyelesaian konflik dan penyatuan kembali melalui Munaslub adalah momentum untuk menumbuhkan harapan baru dan legitimasi politik baru di mata publik.

Tolak ukur legitimasi baru bukan sekedar kompromi politik, akan tetapi harus mencerminkan hal-hal baru dalam pelaksanaannya, yakni Munaslub harus menghasilkan konsensus baru, Munas harus melahirkan komitmen baru yang mengedepankan kepentingan partai di atas segala kepentingan, lalu Munaslub harus juga melahirkan konsep baru dalam menata organisasi, dan tak kalah penting Munaslub juga harus melahirkan generasi kepemimpinan baru.

Khusus poin terakhir, sangat penting. Selain untuk mewujudkan rekonsiliasi, regenerasi juga merupakan jalan terbaik untuk mengantisipasi jumlah banyaknya pemilih muda. Untuk pemilih pemula saja (berusia 17-22 tahun) dari pemilu ke pemilu

terus bertambah. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11 persen dari total 186 juta jiwa pemilih. Jumlah ini meningkat dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4 persen). Sementara pada Pemilu 2009, ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih (21 persen) (Kompasiana.com, 2016)

Bonus demografi yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan juga menjadi perhatian penting tentang karakter pemilih di masa depan. Selain jumlahnya yang besar, kesadaran para pemilih muda untuk berpartisipasi juga sangat besar. Antusiasme pemuda bisa dilihat dari bentuk-bentuk kampanye kreatif yang mulai menggeser kampanye transaksional. Regenerasi pada intinya adalah kunci untuk mengakomodasi besarnya pemilih muda, dan tentunya legitipasi Partai Golkar di masyarakat.

Munaslub Partai Golkar yang digelar 14-17 Mei di Bali menjadi momentum untuk menentukan masa depan politik partai berlambang beringin itu. Momentum tersebut merupakan langkah untuk menentukan ketua umum dan menentukan prioritas dalam menyatukan institusi partai yang dilanda konflik berlarut-larut selama satu setengah tahun. Meski terlambat, Golkar sebagai partai berpengalaman akhirnya bisa duduk bersama dan menyepakati munaslub sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik.

Munaslub sebagai munas islah atau rekonsiliasi wajib mengusung semangat kebersamaan untuk menguatkan

kesepahaman, sejatinya islah senantiasa mengandung dua makna politis. Pertama, membangun komunikasi politik untuk menciptakan pemahaman bersama, sehingga terjalin pola interaksi sederajat yang mengarah pada penyelesaian masalah. Kedua, membuka diri untuk melakukan akomodasi politik dengan mengedepankan bauran kepengurusan secara seimbang dari kedua kubu yang berkonflik. Islah bukan semata bersepakat, tetapi juga mengharuskan adanya pemahaman, niat baik (*good will*) dan niat politik (*political will*) untuk menjaganya sehingga menguatkan daya tahan dan kebersamaan di tengah turbulensi yang terjadi. (Heriyanto, uinjkt.ac.id, 2016).

Selain itu, menjelang Munas, ada kemauan membuka ruang bagi siapa pun dari kedua kubu untuk memajukan figur kandidat yang akan bertarung. Walaupun pada tahap awal ada keharusan membayarkan mahar Rp1 miliar bagi mereka yang akan mencalonkan diri, namun belakangan disadari panitia munaslub sebagai kekeliruan dan mereka mengubahnya menjadi sumbangan tidak mengikat. Munaslub sebagai momentum rekonsiliasi semakin lempang dengan kesediaan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk tidak mencalonkan diri dan memberikan kesempatan kepada sejumlah figur lain untuk bertarung.

Golkar saat ini tidak memiliki veto player seperti PDIP, Gerindra, dan Demokrat. Karena itu, delapan kandidat yang bertarung menuju Golkar-1, kemarin, sesungguhnya memiliki

peluang keterpilihan yang sama meskipun mereka ditentukan modal sosial, finansial, dan politik berbeda-beda.

Munaslub bukan akhir, melainkan awal dari sebuah jalan terjal bagi Golkar di masa depan. Paling tidak menurut Heriyanto (uinjkt.ac.id, 2016). ada empat agenda prioritas yang harus diperhatikan Golkar pascamunas. Pertama, Ketua Umum Golkar terpilih harus memprioritaskan konsolidasi internal secara masif dari pusat hingga daerah. Konflik sebagai dampak kubu-kubuan telah menyisakan realitas politik yang bipolar, bahkan multipolar dan tentu kondisi ini membahayakan eksistensi partai Golkar. Ibarat klub bola, Golkar adalah tim yang berlimpah pemain senior, berpengalaman, dan piawai. Namun, jika tak mampu mengelola ego para ‘pemain bintang’, Golkar justru akan disibukkan dengan kepentingan politik elite mereka yang berbeda-beda tanpa menuju arah yang sama secara kelembagaan. Ketua Umum Golkar yang baru harus sesegera mungkin mengefektifkan komunikasi politik secara vertikal dan horizontal. Vertikal ialah terhubung dengan struktur partai dari pusat hingga daerah, sedangkan horizontal ialah terhubung dengan seluruh jejaring Golkar, mulai sesepuh, organisasi sayap, hingga kekuatan potensial di internal dan eksternal. Prioritas komunikasi politik ini diperlukan untuk memastikan suasana kondusif setelah konflik satu setengah tahun dan juga pertarungan perebutan kursi Golkar-1.

Model komunikasi yang dipraktikkan tidak lagi bisa model linear atau searah, tapi harus model interplay atau timbal balik

secara demokratis. Harus ada upaya merangkul dan memastikan keinginan kepengurusan baru yang menciptakan suasana kondusif, demokratis, serta berorientasi pada semangat kekitaan di internal partai. Jika munaslub gagal menghadirkan figur yang komunikatif, potensi gagalnya rekonsiliasi terbuka lebar. Bahkan, jika konflik mengemuka lagi pascamunas, itu akan berdampak pada meluas dan mendalamnya konflik itu di masa mendatang.

Kedua, Ketua Umum Golkar harus memastikan program yang jelas, bertahap, dan berkelanjutan terkait dengan pengelolaan Golkar ke depan yang berbasis aturan dasar dan aturan rumah tangga partai yang dikonsensuskan secara bersama. Bukan bertindak semaunya atas nama kepentingan pribadi dan kelompok kecil. Inilah yang disebut sebagai langkah penstrukturan adaptif. Banyak partai mengalami kegaman dalam melakukan penstrukturan adaptif di tubuh organisasi.

Dalam terminologi Anthony Giddens sebagaimana dikutip West dan Turner dalam *Introducing Communication Theory* (2008), penstrukturan adaptif ialah bagaimana institusi sosial, seperti organisasi diproduksi, direproduksi, dan ditransformasikan melalui penggunaan aturan-aturan yang akan berfungsi sebagai perilaku para anggotanya. Dengan demikian, struktur diciptakan dan dipertahankan sekaligus juga dapat diubah dengan mengadaptasi atau menciptakan aturan baru. Artinya, partai politik seharusnya memperkuat sistem organisasi yang ditaati semua warga partai, bukan sebaliknya, menyuburkan feodalisasi, politik patron-client

yang menyebabkan organisasi di bawah subordinasi satu atau beberapa orang saja.

Golkar sesungguhnya punya peluang membangun partai modern karena ketiadaan veto player. Hanya, politik pragmatis kerap menyeret Golkar dalam kegamangan dalam menaati aturan dasar dan aturan rumah tangga yang disepakati. Lebih jauh, Golkar sering terjebak dalam model oligarki partai politik karena keputusan dan kebijakan partai hanya diambil segelintir elite berkuasa di Golkar. Mereka menutup akses dari dialektika dan masukan dari luar kelompok kecilnya yang mengendalikan partai. Dampaknya, alur tata kelola partai tidak transparan, tidak demokratis dan sangat eliteis. Wajar jika partai kembali ke tradisi lama feodal, oligarkis, dan transaksional. Posisi Golkar yang dikelola secara oligarkis akan menimbulkan gejala groupthink! Gejala ini oleh Irving Janis dalam karyanya *Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes* (1982) digambarkan sebagai kelompok yang sering kali gagal mengembangkan alternatif-alternatif tindakan yang mereka ambil. Para kader berpikir sama dan menghindari pemikiran berlawanan sehingga sangat sedikit kemungkinan munculnya ide-ide yang tidak populer atau tidak serupa dengan elite utamanya.

Ketiga, harus ada prioritas dalam rebranding dan reformulasi Golkar sebagai institusi. Dalam jangka pendek, harus ada racikan strategi untuk memastikan daya saing Golkar di sejumlah Pilkada Serentak 2017, 2018, serta pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Data menunjukkan Golkar fluktuatif. Di Pemilu 1999 Golkar

terpuruk dengan hanya memperoleh suara pemilu legislatif 22,4%, menjadi pemenang di 2004 dengan perolehan 21,6%, hanya mendulang suara 14,4% di Pemilu 2009, dan bertengger di peringkat kedua dengan perolehan suara 14,7% di Pemilu 2014. Tragisnya, meski menjadi pemenang kedua di pemilu legislatif, Golkar mengalami krisis figur yang bisa ‘dijual’ di pasar pemilih pemilu presiden. Langkah itu diperparah dengan terpuruknya Golkar di pilkada serentak akibat dualisme kepengurusan.

Keempat ialah fungsionalisasi partai sebagai entitas publik. Kekuatan partai modern di masa mendatang ialah public trust. Tak mungkin muncul kepercayaan publik tanpa adanya kinerja partai yang beririsan dengan sejumlah isu dan kepentingan publik. Golkar dan juga sejumlah partai lainnya masih dipersepsikan eliteis dan berjarak dengan urusan publik. (Heriyanto, uinjkt.ac.id, 2016)

3.3. Rasa Memiliki Terhadap Partai.

Pada dasarnya hampir semua kader menginginkan dilakukannya rekonsiliasi untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar. Priyo Budi Santoso mendesak kedua kubu untuk melakukan rekonsiliasi menjelang Munaslub Golkar. Begitu pula para pimpinan Organisasi pendiri Partai Golkar, Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menyerukan adanya rekonsiliasi terhadap kepengurusan partai berlambang beringin di bawah pimpinan Aburizal Bakrie. Ketua

MKGR Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya merasa prihatin terhadap kisruh Golkar yang sedang terjadi selama ini.

"Kami kaget dan prihatin yang mendalam, menjelang munas terjadi semua yang telah diberitakan luas. Berangkat dari keprihatinan sebagai organisasi lahirnya Golkar, kami menyerukan kepada semua pihak untuk mengikat kekeluargaan, gotong royong tetap nilai-nilai itu menaungi perbedaan pendapat yang terjadi," (SKH Merdeka 2014)

Pihaknya meminta penyelenggaraan Munas Golkar ke IX harus demokratis dan transparan agar tidak terjadi kekisruhan di tubuh internal partai. Pihak MKGR menghendaki penghentian pemecatan terhadap para pengurus dan kader Golkar baik di DPD I maupun DPD II dengan alasan perbedaan politik. Pihak MKGR Pada era kejayaannya, Golkar tidak mudah untuk pecah karena ada tokoh pemersatu yaitu Soeharto, yang didukung oleh tiga kekuatan ABG, yakni ABRI, birokrasi, dan politisi Golkar. Namun kini, Soeharto sudah tiada, Golkar kehilangan tokoh kharismatik yang secara efektif dapat mencegah perpecahan dalam tubuh Partai Golkar. Saat ini, tidak lagi mudah untuk menjaga keutuhan Partai Golkar hanya dengan mengandalkan figur semata.

Partai Golkar juga telah ditinggalkan oleh Mayor Jenderal (Purn) Suhardiman. (Alm) Suhardiman bukan tokoh politik biasa, dia adalah pendiri Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sekaligus juga pendiri Partai Golkar. Kepergian Suhardiman meski tidak mengoyahkan posisi politik Golkar, tetapi jelas tidak menguntungkan Partai Golkar. Padahal Suhardiman juga

"aset" Golkar dengan posisinya sebagai "penasihat politik" Partai Golkar. Suhardiman yang selama ini dengan analisis tajamnya selalu tepat meramalkan masa depan Partai Golkar.

Dukun politik itu kini juga sudah tidak mungkin dimintai pertolongan untuk "menyembuhkan" Partai Golkar. Golkar, partai yang pernah menjadi partai terbesar di republik ini, kini sedang "sakit keras". Sulit menyangkal bahwa Partai Golkar sedang baik-baik saja. Indikatornya adalah Partai Golkar tidak mendudukan diri sebagai tiga besar partai yang kadernya memenangkan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Meski sempat duduk sebagai partai kedua terbesar pada pemilihan legislatif 2014 kini justru PDI-P dan Nasdem yang berjaya saat Pilkada serentak.

Sakitnya Partai Golkar, salah satunya disebabkan pertarungan mempertahankan figur. Padahal, Golkar dapat bertahan di awal masa reformasi bukan karena figur tertentu tetapi oleh penataan kelembagaan partai, penataan perkaderan, hingga penanaman nilai-nilai kegolkaran yang sesuai kebutuhan reformasi dan demokratisasi.

Sistem yang terbentuk itu ditasbihkan oleh Ketua Umum Partai Golkar (1998-2004) Akbar Tandjung sebagai "Paradigma Baru Partai Golkar". Akbar Tandjung bahkan menjadi "korban" dari Konvensi Calon Presiden dari Golkar pada tahun 2014 dengan kalah dalam konvensi tersebut. Kekalahan Akbar memperlihatkan sistem yang dibangunnya benar-benar berjalan. Bersama Partai Golkar pada tahun 2016. Akbar selalu berdiri di tengah pergolakan bersejarah di

partai Golkar dan Akbar telah memperlihatkan kepedulian dan rasa memiliki terhadap Golkar.

Kader Golkar diharapkan mau berkontribusi dalam proses rekonsiliasi, serta tidak mengeluh atau bereaksi negative. Substansinya adalah, bagaimana Partai Golkar diselamatkan dari kehancuran.

Kini, Partai Golkar sudah hancur berantakan. Kader Partai Golkar terpecah belah. Satu sama lain saling curiga, dan bermusuhan. Apalagi yang harus dipertahankan. Para petinggi Golkar menyerukan diadakannya rekonsiliasi untuk penyelamatan Partai Golkar. Pemimpin Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie diharapkan lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dan musyawarah.

Perubahan sikap fungsionaris Golkar terlihat ada perubahan, terutama sikap rasa memiliki terhadap partai, sebagaimana diketahui, Golkar adalah partai yang sudah biasa berkuasa selama 30 tahun, maka ketika Golkar tidak lagi memiliki kekuasaan penuh, hal ini berimplikasi terhadap kebanggaan terhadap partai, karena kebanggaan yang telah terstigma dalam diri kader Golkar adalah Kekuasaan. Fungsionaris akan sangat memiliki terhadap partai Golkar manakala partai tersebut mampu memberikan kontribusi kekuasaan pada mereka.

BAB IV

KONFLIK DAN REKONSILIASI PARTAI GOLKAR

4.1. Latar Belakang Munculnya Konflik

Kisruh kepengurusan Partai Golkar yang berlarut-larut selama 1,5 tahun terakhir tampaknya mulai menggerus keyakinan publik terhadap partai beringin ini. Jika tak ada penyelesaian yang memadai, partai besar yang pernah menguasai politik Indonesia ini bisa bergeser menjadi parpol gurem. Sepanjang sejarah era reformasi, suksesi kekuasaan politik Partai Golkar sering terjadi tarik-menarik kepentingan yang senantiasa mewarnai pergeseran penguasaan elite di parpol beringin.

Konflik terbaru yang muncul ke publik adalah perebutan legitimasi kepengurusan partai antara kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono dan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

Perbedaan tarikan kepentingan politik menjadi asal terjadinya dua versi munas Partai Golkar tersebut. Pokok persoalan yang digugat kubu Munas Ancol adalah ketidakmampuan Golkar mengusung calon presiden ataupun wakil presiden sendiri. Posisi Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden Joko Widodo saat itu justru diusung partai lain. Oleh karena itulah, tokoh-tokoh kubu Munas Ancol, yaitu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Priyo Budi Santoso, menamakan diri "Tim Penyelamat Partai Golkar".

Saling gugat antara kedua kubu berlangsung dalam periode sepanjang 2015. Keputusan Mahkamah Partai Golkar pun bersifat mendua. Empat hakim Mahkamah Partai memberikan keputusan mendua, dua hakim memenangkan munas kubu Ancol, sementara dua lainnya meminta kubu Ancol menerima kubu Munas Bali. Sampai dengan awal 2016 ini, konflik kedua kubu masih runcing.

Pada Senin, 11 Januari 2016, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie dipanggil menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Namun, selepas pertemuan itu, perbedaan cara pandang kedua pihak dalam penyelesaian konflik masih terlihat jelas. Agung Laksono menyatakan bahwa penyelesaian konflik akan dilakukan dengan sebuah "Musyawarah Nasional (Munas) Bersama", sementara Aburizal Bakrie menyatakan bahwa Munas Bersama bukan bentuk yang dikenal AD/ART partai.

Konflik Partai Golkar bukanlah fenomena baru, dimasa lalu, konflik internal semacam ini berakhir dengan terbentuknya partai-partai "replika" dari Partai Golkar, seperti Partai Demokrat, PKP Indonesia, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Konflik kali ini belum menampakkan ujung yang jelas, apakah akan berakhir dengan kepengurusan terbentuknya partai baru atau lainnya. Skala konflik kali ini juga tampaknya cukup meluas melibatkan komponen elite pendiri Partai Golkar hingga level simpatisan.

Beragam asumsi bisa diajukan sebagai penyebab berlarutnya konflik di tubuh partai beringin. Sejumlah pendapat menyorot spirit

pragmatisme partai yang kuat kepada kekuasaan politik. Lemahnya ideologisasi parpol di tengah kuatnya sistem demokrasi yang dikembangkan para kader Golkar menjadi titik lemah partai beringin.

Pendapat lain menunjuk tidak adanya figur atau tokoh karismatik yang mampu menjadi simbol sekaligus pemersatu partai yang disegani sebagaimana masa lalu. Pada era Orde Baru, peran sentral Presiden Soeharto telah membuat ratusan komponen masyarakat penyusun Golkar menjadi padu dan solid. Pasca reformasi, patron politik kuat semacam itu hilang.

Awal Golkar didirikan berupa Sekretariat Bersama (Sekber) pada 20 Oktober 1964 dengan tak kurang 53 serikat buruh dan organisasi pegawai negeri, 10 organisasi intelektual, 10 organisasi pelajar dan mahasiswa, 5 organisasi perempuan, 4 asosiasi media, serta 2 organisasi petani dan nelayan.

Jika ditelusuri, saat Orde Baru berkuasa pun Sekber Golkar tidak luput dari pertarungan politik internal. Tak lama setelah G30S terjadi, perwira-perwira militer dan pimpinan sipil yang dekat dengan Presiden Sukarno disingkirkan digantikan oleh kalangan pro Jenderal Soeharto.

Prestasi yang didulang Golkar pada era keemasan Orde Baru memang terlihat mencolok. Pada Pemilu 1977 Golkar meraih 62,1 persen, Pemilu 1982 menggaet 63,9 persen suara, Pemilu 1987 naik mendapatkan 73,1 persen, dan Pemilu 1992 meraih 68,1 persen.

Kemenangan itu bisa terjadi. Sebab, selama Orde Baru, Golkar solid dengan didukung tiga pilar utama: militer, birokrasi, dan teknokrat. Pada Pemilu 1999, Partai Golkar menempati urutan kedua dengan meraih 35,7 juta suara (22,5 persen) dan menempatkan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung sebagai ketua DPR. Kekokohan Partai Golkar dalam politik Indonesia dibuktikan dengan kembali menjadi partai pemenang Pemilu Legislatif 2004, Partai Golkar meraih 24,4 juta suara (21,58 persen). (Suryaningtyas, 2016)

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang diselenggarakan pada 11 Juli 1998 di Jakarta menjadi ajang pertarungan politik paling keras sejak Golkar didirikan. Munaslub itu memperebutkan posisi ketua umum Golkar menggantikan Harmoko.

Posisi ketua umum dimenangi politisi sipil, Akbar Tandjung, dengan mengalahkan calon dari militer, Jenderal Edi Sudrajat. Pertentangan yang cukup tajam mengakibatkan keluarnya Edi Sudrajat dan beberapa tokoh Golkar dari kubu Edi Sudrajat yang tergabung dalam Kosgoro.

Mereka kemudian mendirikan partai baru, Partai Keadilan dan Persatuan, yang dideklarasikan pada 15 Januari 1999. Keluarnya kubu Edi Sudrajat diikuti terpecahnya organisasi yang menjadi *onderbouw* Golkar, MKGR. Di bawah pimpinan Mien Sugandhi, MKGR menjadi partai politik baru. Beberapa pucuk pimpinan organisasi massa Pemuda Pancasila juga membentuk parpol baru Partai Patriot Pancasila dipimpin Yapto S Soerjosoemarno.

Konflik lainnya terekam dalam pilpres putaran pertama 2004. Golkar mencalonkan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, sementara Jusuf Kalla memilih berduet dengan capres partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Kondisi ini menciptakan perpecahan dalam tubuh Golkar.

Jusuf Kalla diberhentikan sebagai Penasihat DPP Partai Golkar dan sembilan pengurus Partai Golkar dipecat. Alasannya, Jusuf Kalla dan sembilan fungsionaris lain dianggap tidak mematuhi keputusan rapat pimpinan partai. Sebagai catatan, sejak berdiri tahun 1964 dalam bentuk Sekber Golkar, belum pernah ada pemecatan massal seperti itu.

Hasil akhir Pilpres 2004 memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Kemenangan ini rupanya menjadi arus balik pendulum politik Golkar sekaligus menunjukkan pragmatismenya partai ini. Saat Munas VII Partai Golkar di Bali, 16-19 Desember 2004, Jusuf Kalla mengalahkan Akbar Tandjung dalam perebutan jabatan Ketua Umum Golkar periode 2004-2009. Kemenangan Jusuf Kalla dalam posisi menjadi wakil presiden ini mengukuhkan idiom Golkar sebagai partai yang lekat kekuasaan.

Pertentangan di level elite pengurus Partai Golkar sejauh ini ditengarai menjadi konsumsi elite atau ormas pendukung Golkar. Level masyarakat di akar rumput agaknya tidak terlalu berpengaruh pada elektabilitas partai.

Sejumlah penajakan hasil survei memperlihatkan elektabilitas parpol ini malah sedikit beranjak seiring konflik yang terjadi. Survei

yang diselenggarakan pada awal 2015, misalnya, memperlihatkan tingkat elektabilitas Golkar yang berada di angka 7,1 persen. Pada survei triwulanan selanjutnya angka itu membaik menjadi 9,6 persen, bahkan 11,2 persen pada Oktober 2015. Posisi partai ini juga tetap bertahan di peringkat ketiga setelah PDI-P dan Partai Gerindra.

Meski demikian, dalam ajang kontestasi kepala daerah di Pilkada Serentak 9 Desember 2015, terbukti akibatnya sama sekali berbeda. Perpecahan kepengurusan ini membuat buyar kemenangan pasangan calon kepala daerah dari Golkar. Dari total 12 pasangan calon kepala daerah yang diajukan Golkar, tak satu pun yang mampu meraih kemenangan. Bandingkan dengan kemenangan PDI-P yang mencapai 14 dari 23 pasangan calon yang diajukan sendiri. Kemenangan memang diraih di ratusan basis Golkar, tetapi kemenangan ini diraih dengan berkoalisi bersama parpol lain.

Dari penelusuran di sejumlah daerah pelaksanaan pilkada serentak, perpecahan di level pengurus ini membuyarkan pola dukungan simpatisan atas calon yang diusung. Kader Golkar yang berafiliasi dengan kubu Munas Ancol versi Agung Laksono, misalnya, mendukung calon kepala daerah yang berbeda dengan calon yang diusung calon kubu Munas Bali. Padahal, sejumlah wilayah bisa disebut sebagai wilayah beringin, terutama di kawasan Jawa Barat bagian utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera bagian utara.

Membandingkan pencapaian elektoral Golkar di level nasional dan level lokal, terlihat bahwa ada gejala perbedaan akseptabilitas

oleh publik terhadap kader partai beringin. Di satu sisi bisa jadi menggambarkan negasi yang mulai ditampakkan publik terhadap keberadaan partai yang dipandang pragmatis kekuasaan ini, tetapi bisa jadi juga sebaliknya.

Dalam arti, cara pandang publik pada eksistensi Golkar dan kadernya memang berbeda antara level lokal dan nasional. Terlebih untuk level nasional ada beragam aspek yang memengaruhi pemilih, mulai dari variasi tokoh, sejarah kedekatan simbol Golkar (identifikasi partai), romantika Golkar (aspek psikologis), hingga pertimbangan sosiologis.

Betapapun, satu hal memang sudah jelas terlihat dari konflik partai kakap ini. Buyarnya soliditas dan makin menurunnya citra di mata publik ujung-ujungnya akan merugikan partai beringin.

Jajak pendapat telepon *Kompas* beberapa waktu lalu menengarai, bukan sosok Agung Laksono ataupun Aburizal Bakrie yang dinilai mampu menyelesaikan konflik. Butuh tokoh kuat Golkar di luar kedua sosok itu yang mampu merangkai kembali partai beringin yang semakin hari kian koyak diempas egoisme kepentingan itu.

4.2. Fenomena Penyebab Terjadinya Konflik

Suasana panas jelang Musyawarah Nasional Partai Golkar tidak muncul tiba-tiba. Kegerahan atas prestasi Aburizal Bakrie dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014 lalu, membuat sejumlah politisi Partai Golkar mulai melakukan perlawanan secara senyap. Beberapa Politisi Partai Golkar melawan dengan

menyatakan sikap atau pendapat berbeda. Bahkan, kritik pun dilayangkan di internal partai, sehingga menjelang Munas Partai Golkar, perlawanan semakin menghangat.

Inisiator Gerakan Regenerasi Kepemimpinan Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menyebut, kebekuan politik nasional dan kondisi Partai Golkar yang mengkhawatirkan menjadi pemicu perlawanan terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie. Agun bersama lima rekan di Partai Golkar menggalang pertemuan untuk menghentikan langkah Aburizal Bakrie.

"Saya salat istikharah terlebih dahulu. Dari situ saya mendapatkan tekad bulat untuk membenahi Golkar secara total". Karena yang salah bukanlah partai, tapi siapa yang memimpin (Sudarsa, tribunnews.com 28 November 2014).

Inisiasi melawan Aburizal mendapat respon dari tujuh calon ketua umum Golkar yang menyokong inisiasi Agun. Pertemuan dilaksanakan di Bima Sena Club, Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta. Sebelumnya, Agus Gumiwang, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, MS Hidayat, dan Airlangga Hartarto menyepakati pelaksanaan Munas Golkar pada Januari 2015. Kesepakatan itu diharapkan mampu meredakan konflik internal yang menghendaki Munas Golkar digelar tahun 2014. Kesepakatan itu mentah setelah Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Hotel Meliapurosani Yogyakarta yang memutuskan bahwa, Rapimnas akan dilaksanakan pada 30 November 2014.

Konflik semakin meruncing setelah berhembus kabar Aburizal Bakrie akan memenangkan Munas Partai Golkar secara aklamasi. Skenario memenangkan Aburizal dilakukan di Pulau Dewata. Ditengarai ada scenario pemilihan Aburizal Bakrie secara aklamasi. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzily membandingkan pemilihan Aburizal secara aklamasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Bagi Syadzily Ical tidak memiliki prestasi yang signifikan, terbukti tidak berhasil mempertahankan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu dan gagal menjadi calon presiden, sedangkan Megawati berhasil membuat PDIP menang dalam Pemilu dan menempatkan kadernya menjadi presiden.

4.2.1. Kekalahan Pemilu

Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi mengungkapkan bahwa, penyebab terjadinya konflik berkepanjangan di tubuh Golkar dikarenakan mekanisme islah tidak kunjung terwujud dan perselisihan kepengurusan harus dibawa ke pengadilan. Golkar merupakan partai besar dan tua karena telah berdiri pada 20 Oktober 1964, ini yang membuat susunan pengurus menjadi gemuk dan dianggap rentan menimbulkan perpecahan di internal. Susunan organisasi hasil Munas Riau dianggap terlalu gemuk, yang mengakibatkan pusat kekuasaan Golkar tidak solid.

Kondisi politik nasional sebenarnya juga ikut mempengaruhi suasana internal Golkar, khususnya dalam pertarungan Pilpres 2014.

Golkar waktu itu gagal mengusung calon dan akhirnya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang kalah oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dengan kekalahan itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Golkar mengambil sikap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut dianggap oleh beberapa tokoh Golkar menabrak doktrin partai yang harus selalu berada di pemerintahan demi menjalankan visi dan misi partai.

Sempitnya jarak antara waktu suksesi kepemimpinan Golkar dengan suksesi kepemimpinan nasional, dianggap menjadi pemicu pecahnya konflik di Golkar karena ada perdebatan keras mengenai waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional IX. Ada kondisi yang membuat kader Golkar tidak siap berada di luar pemerintahan.

Perselisihan kepengurusan di tubuh Golkar memuncak karena perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar. Kubu yang berseberangan dengan Aburizal Bakrie menuding penetapan waktu munas tak demokratis dan merupakan skenario memenangkan calon tertentu secara aklamasi. Rapat pleno penentuan waktu Munas IX yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar pada 24-25 November 2014 diwarnai keriuhan. Bahkan, pada 25 November 2014, keriuhan melebar, adu jotos terjadi, dan melibatkan dua kelompok pemuda yang mengklaim sebagai organisasi sayap Partai Golkar. Golkar pun terbelah setelah kubu Aburizal Bakrie menyelenggarakan Munas IX di Bali pada 30 November-4 Desember 2014 dan menetapkan

Aburizal Bakrie sebagai ketua umum serta Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal.

Sementara itu, kubu Agung Laksono menggelar Munas IX pada 6-8 Desember 2014 di Jakarta dan menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum serta Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal. Muladi mengatakan, majelis Mahkamah Partai Golkar pada awalnya sepakat untuk memberikan putusan sela dan memelopori islah dengan melibatkan tokoh senior Golkar. Tetapi, putusan sela itu batal dibacakan lantaran majelis Mahkamah Partai kecewa dengan sikap kubu Aburizal Bakrie yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di tengah berjalannya sidang mahkamah.

Dalam sidang putusan, empat majelis Mahkamah Partai Golkar menyampaikan pandangan berbeda terkait putusan perselisihan kepengurusan Partai Golkar. Muladi dan HAS Natabaya menyatakan tidak ingin berpendapat karena pengurus Golkar hasil Munas IX Bali, atau kubu Aburizal, sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan sela PN Jakarta Barat. Hal tersebut dianggap Muladi dan Natabaya sebagai sikap bahwa kubu Aburizal tidak ingin menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar melalui Mahkamah Partai Golkar.

Dengan sikap tersebut, Muladi dan Natabaya hanya memberikan rekomendasi agar kubu yang menang tidak mengambil semuanya (*the winners takes all*), merehabilitasi kader Golkar yang dipecat, mengakomodasi kubu yang kalah dalam kepengurusan, dan kubu yang kalah diminta untuk tidak membentuk partai baru.

Sementara itu, anggota lain majelis Mahkamah Partai, Djasri Marin dan Andi Mattalatta, menilai Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar secara aklamasi digelar tidak demokratis. Djasri dan Andi menilai pelaksanaan Munas IX Jakarta jauh lebih terbuka, transparan, dan demokratis, meski di lain sisi Andi dan Djasri menilai Munas IX Jakarta memiliki banyak kekurangan.

Majelis Mahkamah Golkar mengungkapkan, putusan itu harus dilaksanakan berikut sejumlah syaratnya, yaitu mengakomodasi kubu Aburizal secara selektif dan yang memenuhi kriteria, loyal, serta tidak melakukan perbuatan tercela untuk masuk dalam kepengurusan partai. Majelis juga meminta kepengurusan Agung untuk melakukan tugas utama partai, mulai dari musyawarah daerah dan penyelenggaraan Musyawarah Nasional X Partai Golkar. Pelaksanaannya paling lambat adalah Oktober 2016.

Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, penyebab konflik Golkar tidak lain adalah pemilihan presiden (pilpres). Oleh sebab itu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) bisa dimanfaatkan dengan baik. Tidak adanya ketetapan atau mekanisme menjelang Pilpres membuat momen ini menjadi celah konflik di internal.

Harus ada Aturan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) dalam menentukan calon presiden yang akan diusung oleh partai. Sejauh ini, tidak ada draft di partai yang mengatur hal

tersebut. Potensi konflik seperti ini lima tahun sekali. Parpol ini harusnya sudah bicara pemilihan presiden dalam AD/ART nya. Permasalahan Golkar terkadang lantaran kebijakan partai dengan dewan pembina partai tidak sejalan (Kurnia, merdeka.com. 2016).

Terlepas dari berbagai kontroversi dalam tubuh partai, Golkar telah mewarnai dinamika politik negeri ini selama lebih dari empat dekade. Banyak tokoh-tokoh nasional, lahir dan besar di partai ini. Meski sempat dicaci-maki dan bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh sebagian aktivis prodemokrasi di awal reformasi, Golkar justru tetap berkibar, bahkan meraih kemenangan dalam Pemilu Legislatif 2004.

Konflik internal di Partai Golkar jika ditarik ke belakang berakar pada melembaganya oligarki dalam kepemimpinan partai. Fenomena ini mulai tampak dalam kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 yang kurang mengakomodasi para lawan politik Aburizal Bakrie, ketua umum terpilih pada waktu itu. Akhirnya, tokoh hebat seperti Surya Paloh, keluar dari Golkar dan memilih mendirikan Partai Nasdem, mengikuti jejak mantan beberapa tokoh elite Golkar sebelumnya, seperti Prabowo Subianto (Partai Gerindra), Wiranto (Partai Hanura), dan almarhum Edi Sudrajat (PKP, kemudian PKPI).

Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 adalah titik kulminasi munculnya konflik internal. Partai Golkar yang finish di urutan kedua Pemilu Legislatif (Pileg) justru bimbang mencapreskan Aburizal Bakrie (ARB). Di eksternal partai ada dua kutub kekuatan

yang tengah bersaing sengit: Jokowi versus Prabowo. Golkar yang diharapkan dapat membuat kutub yang baru, justru terhanyut dalam polarisasi tersebut.

Golkar sangat lamban menentukan arah, apakah akan mencapreskan ARB, mendukung Prabowo atau Jokowi. Golkar pun kehilangan momentum, ketika parpol-parpol lain telah menentukan koalisi dalam Pilpres, Golkar belum beranjak ke mana-mana. Golkar pada awalnya sempat akan berkoalisi dengan PDIP-Nasdem-PKB-Hanura. Bahkan ada semacam pra-deklarasi di sebuah pasar tradisional, tapi tiba-tiba wacana koalisi tersebut kandas tanpa alasan yang jelas. Konon ARB meminta konsesi atas dukungannya, inilah yang ditolak Jokowi. ARB dan Golkar akhirnya memutuskan mendukung Prabowo.

Lepas dari ARB, Jokowi cukup cerdas dengan memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden. Jusuf Kalla adalah mantan Ketua Umum Golkar dan masih punya pengaruh kuat di lingkungan Partai Golkar. Di sinilah konflik mulai terkuak. Sebagian tokoh-tokoh Golkar menyayangkan ARB yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Beberapa tokoh penting dan tokoh muda Golkar akhirnya justru mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Ancaman pemecatan pun dilancarkan. Sejak awal telah diprediksi, jika Prabowo-Hatta memang, maka ARB akan dianggap berhasil dalam pertarungan politiknya. Tapi jika Jokowi-JK berhasil memenangi Pilpres, maka habislah ARB.

Mendapat serangan bertubi-tubi, pengelolaan partai tidak lagi demokratis. Para calon ketua umum yang ingin berkompetisi dalam Munas Bali tidak memperoleh akses yang setara, fair, dan terbuka. Realitas inilah yang menimbulkan kekecewaan sebagian jajaran Golkar, sehingga mendorong berlangsungnya Munas Golkar di Jakarta, hanya berselang seminggu kemudian, yakni pada 6-8 Desember 2014. Konflik internal terjadi secara berkepanjangan.

Meski sejumlah langkah hukum ditempuh kedua pihak, konflik tak kunjung usai. Tim Transisi yang dibentuk Mahkamah Partai Golkar menawarkan Munas sebagai solusi penyelesaian konflik Golkar. Di luar dugaan, tawaran tersebut akhirnya direspon positif oleh kubu ARB yang menyelenggarakan Rapimnas pada 23-25 Januari 2016 yang lalu dengan mengusulkan Munas “luar biasa”. Pemerintah pun akhirnya memfasilitasi upaya islah tersebut melalui perpanjangan masa jabatan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau pada 2009 hingga enam bulan ke depan. Munaslub akan digelar sekitar 15-17 Mei 2016 di Bali.

Akar dan kronologis konflik di tubuh Partai Golkar terlihat bahwa, persoalan yang sebenarnya hanya terjadi dalam lingkaran elite Partai Golkar. Konflik yang sederhana, terjadi di kalangan antar teman dan sahabat yang sudah lama kenal-mengenal selama bertahun-tahun. Hanya saja, akibat konflik tidak dikelola dengan baik, bahkan cenderung diremehkan lewat komentar-komentar singkat dan pedas di berbagai media massa, konflik ternyata meluas dan mendalam dengan menyeret struktur pimpinan Partai Golkar di

tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. (Piliang, www.selasar.com. 2016)

Faktor utama munculnya konflik adalah Pilpres 2014 dan pembentukan Koalisi Merah Putih (KMP). Pilpres membawa dampak pada hubungan personal di dalam Partai Golkar. Pemicu utamanya adalah akibat kekalahan yang diderita pasangan Prabowo-Hatta dan dukungan sebagian kader Partai Golkar kepada pasangan Jokowi-JK. Sudah sejak awal tahapan Pilpres dimulai, Partai Golkar menyatakan diri mendapatkan porsi kekuasaan apabila Prabowo-Hatta menang. Keinginan untuk mengendalikan pemerintahan itu disampaikan dalam bahasa gamblang, yakni kedudukan Menteri Utama dan sejumlah kursi kabinet lainnya untuk Partai Golkar. Kenyataan akhirnya berkata lain. Jangankan memperoleh kedudukan sebagai Menteri Utama, pasangan Prabowo-Hatta malah kalah dalam Pilpres.

Selama proses tersebut, politisi Partai Golkar terseret arus kampanye masif selama Pilpres. Informasi yang diperoleh dari luar, dibawa ke arena rapat di dalam Partai Golkar, tanpa proses verifikasi yang memadai. Publik mencatat, kampanye Pilpres 2014 adalah yang terburuk dan terhitam dalam sejarah Indonesia modern. Berbagai propaganda dan kampanye hitam disebar, terutama melalui media sosial. Usai Pilpres, sama sekali verifikasi terhadap pelbagai kampanye hitam itu tidak dilakukan, guna menghindari sebutan anti terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Malahan konflik yang ditinggalkan selama Pilpres bukan melunak melainkan

semakin mengeras dan terus dibawa, dengan upaya partai-partai politik pendukung Prabowo-Hatta untuk mengubah sejumlah undang-undang mulai dari MD3 (yang ini malah sebelum pilpres) hingga pemilihan kepala daerah.

Pembentukan KMP secara permanen juga memberi dampak negatif kepada Partai Golkar. Walau pernah menjadi wacana politik pada awal Munas Partai Golkar di Riau untuk menjadi partai oposisi, Partai Golkar sama sekali tidak pernah berada di luar pemerintahan, ini bertentangan dengan narasi kekaryaan Golkar. Keberadaan Partai Golkar sebagai pemimpin KMP, membuat wacana itu hidup kembali. Padahal, catatan Munas Partai Golkar Riau 2009 menunjukkan bahwa kubu ARB-lah yang menolak Partai Golkar sebagai partai oposisi. Hal itu dibuktikan dengan pembentukan Sekretariat Gabungan partai-partai politik, lewat perjanjian tertulis dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tiga kursi menteri diberikan kepada politisi Partai Golkar sebagai imbalan.

Sumber masalahnya, posisi sebagai “oposisi” atau penyeimbang pemerintah itu berkebalikan dengan fakta yang sebenarnya. Mayoritas pimpinan daerah Partai Golkar menjadi bagian dari pemerintahan daerah, baik dalam posisi sebagai kepala atau wakil kepala pemerintah daerah, maupun sebagai anggota legislatif daerah yang dikenal bukan sebagai parlemen lokal. Bagaimana mungkin sebagai pimpinan pemerintahan daerah, politisi Partai Golkar menjadi penyeimbang, apalagi oposisi terhadap pemerintahan pusat dan bagaimana mungkin sebagai kepala daerah,

melakukan “oposisi” atau “penyeimbang” terhadap diri sendiri. KMP hanyalah paradigma politik elite pusat, tapi tidak bisa dijalankan sebagai model atau pola pemerintahan di daerah.

4.2.2. Campur Tangan Pemerintah

Konflik pada tubuh Golkar semakin memanas setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pekan lalu mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono. Kubu Aburizal Bakrie melaporkan Agung Laksono dan kawan-kawan ke Bareskrim atas sangkaan pemalsuan surat mandat yang dibawa dari daerah ke Musyawarah Nasional Ancol.

Menteri Hukum Yasonna mengambil keputusan tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar. Mahkamah Partai menerima kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Ancol dengan ketua Agung Laksono berdasarkan pertimbangan dua hakim Mahkamah Partai, yaitu Djasri Marin dan Andi Matalatta. Sedangkan hakim Muladi dan Natabaya memilih tak bersikap.

Penyelesaian lewat jalur pengadilan tampaknya menjadi pilihan terakhir yang harus ditempuh partai-partai lain yang tengah dilanda konflik kepengurusan. Hal yang sama dilakukan Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Djan Farid dan M. Romahurmuziy.

Konflik Golkar dan PPP ini memiliki latar belakang dan jalan penyelesaian yang berbeda. Pertama, Partai Persatuan Pembangunan, Konfliknya bermula dari sikap Ketua Umum

Suryadharma Ali yang dianggap tidak menjalankan rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional terkait nama-nama bursa calon presiden. Status tersangka, yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Suryadharma beberapa pekan setelahnya, juga ikut memicu polemik dua kubu.

Permohonan pengesahan legalitas partai yang diajukan kubu Romahurmuziy langsung disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lantaran undang-undang mewajibkan menteri menindaklanjuti permohonan tersebut paling lambat satu pekan setelah muktamar. Tak ada keberatan yang diajukan kubu Suryadharma selama proses pengesahan.

Kedua, kubu enggan menempuh penyelesaian lewat mekanisme Mahkamah Partai dan mendorong penyelesaian lewat meja hijau. Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan permohonan yang diajukan kubu Djan Farid untuk menunda penetapan legalitas partai kubu Romahurmuziy. Kubu Romahurmuziy mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kasus di Partai Golkar, Perpecahan berawal dari sikap panitia pelaksana, para pendukung Ketua Umum Aburizal Bakrie, yang memaksakan jadwal musyawarah nasional di Bali dalam rapat pleno. Penetapan jadwal itu diprotes kubu Agung Laksono lantaran dianggap tidak demokratis. Kubu Agung lalu membentuk Presidium Penyelamat Partai dan memecat Aburizal.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengaku tak bisa memproses permohonan legalitas partai yang diajukan

kepengurusan hasil Munas Bali yang kembali memenangkan Aburizal sebagai ketua umum. Sebab, permohonan serupa diajukan kubu Agung Laksono yang menyelenggarakan Munas di Ancol dalam waktu satu pekan setelah Munas Bali.

Pengadilan Tata Usaha Negara menolak memutus objek sengketa dan menyerahkan penyelesaian konflik lewat Mahkamah Partai. Dua dari empat hakim mengakui legalitas kubu Agung, sedangkan sisanya tidak bersikap. Kubu Aburizal kembali melakukan aksi protes.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, konflik internal Partai Golongan Karya dan PPP dikarenakan, adanya ikut campur pemerintah dalam konflik di kedua partai tersebut yang membuat permasalahan semakin berlarut-larut. Pemerintah dianggap terlalu banyak ikut campur. Konflik di tubuh partai yang mengarah kepada perpecahan, kongres, munas tandingan, kepengurusan ganda, itu bukan hal baru di Indonesia, tapi yang menarik seolah-olah ada intervensi, keberpihakan kekuasaan,

Apa yang dikatakan SBY ini terkait dengan sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang beberapa kali menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kepengurusan sah Partai Golkar dan PPP. Dalam hal Golkar yakni kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, sementara PPP adalah kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy.

Pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah dengan merujuk pada UU Partai Politik. Ini terkait bagaimana penyelesaian konflik di tubuh partai yang harus diselesaikan oleh pihak internal

dengan mekanisme masing-masing, termasuk sesuai AD/ART tiap parpol.

Kalau pihak yang bersengketa membawa ke ranah hukum maka domainnya hukum. Hukum juga jelas, siapa yang menang dan bersalah. Meskipun proses hukum mewadahi mekanisme naik banding, sampai nanti inkrah.

Jika melihat dua perspektif yang dimaksud, penyelesaian konflik internal Partai Golkar dan PPP sudah dapat dinalar dengan akal sehat. Permasalahan pun bisa segera selesai dengan solusi yang tepat.

Terkait dengan kedaulatan partai, maka harus dilakukan koreksi bersama agar demokrasi tidak goyah, dan keadilan bisa ditegakkan. Konflik internal partai yang tampaknya berlarut-larut, berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun, seharusnya ada

Stake holder atau tokoh politik lainnya perlu mengambil sikap terkait permasalahan konflik Golkar. Para tokoh, dinilainya perlu membantu memberi solusi terhadap kedua partai itu. berpesan kepada pemerintah agar bisa lebih bijaksana dalam menangani permasalahan di tubuh Partai Golkar.

Seperti diketahui, kedua kubu Partai Golkar yang berkonflik sudah sepakat untuk berkonsolidasi. Namun setelah adanya putusan MA yang memenangkan kubu Ical, rencana Munas Islah pun kembali tidak jelas, padahal sebelumnya kedua belah pihak sudah duduk satu meja dan bahkan telah menunjuk kepanitiaan munas. Kini muncul sejumlah suara yang meninginkan Munas tidak lagi

diselenggarakan oleh kepengurusan Riau, seperti amanah SK Menkum HAM, namun dilakukan oleh pihak hasil Munas Bali sehingga menjadi Munaslub.

4.2.3. Tuntutan Perubahan Partai

Menurut Joko Susilo, demi untuk menyelamatkan partai Golkar, Aburizal Bakrie harus legawa tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum. Kalau ARB tetap maju dalam pemilihan ketua umum, maka konflik internal partai tidak akan mereda dan bisa jadi semakin meruncing. Golkar seharusnya belajar dari pengalaman tahun 2004 dan 2009, sehingga elit-elit partai bisa menyelesaikan konflik tersebut. Dari konflik yang terjadi, justru anggotanya pecah dan membentuk partai politik baru, seperti Hati Nurani Rakyat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Konflik yang terjadi saat ini, lanjut dia, bukan masalah perbedaan pelaksanaan munas, namun mengenai perbedaan pandangan dua kubu, yakni kubu status quo dan kubu reformis. Salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan Golkar, adalah ARB harus mundur dari pencalonan ketua umum karena partai yang berjaya di masa Orde Baru itu butuh pemimpin muda yang handal.

Partai Golkar merupakan partai politik yang mapan secara organisasi, memiliki pengalaman yang lama dalam politik nasional, dan memiliki sumber daya manusia yang handal, serta finansial yang cukup besar. Konflik di tubuh Partai Golkar bukan karena sistem atau organisasi partai, namun karena personal ARB yang kurang

mampu menjadi pemimpin yang baik di tubuh partai tersebut. Apabila Ical tidak lagi menjadi ketua umum, lanjut dia, sudah bisa dipastikan pemimpin baru partai berlambang pohon beringin tersebut akan mendekat kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Golkar butuh pemimpin baru yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan para kader. Konflik yang dibiarkan berkepanjangan dapat menjadi bomerang bagi partai dan Golkar justru ditinggalkan konstituennya.

Pemerintah bukanlah penyebab utama terjadinya konflik internal Partai Golkar. Konflik Golkar dimulai sebelum pemerintahan Jokowi terbentuk. Timbulnya konflik Golkar sebagai akibat dari pengelolaan partai yang elitis dan cenderung oligarkis. Seandainya pemecatan atas kader-kader muda partai yang mendukung Jokowi-JK pada pilpres tidak dilakukan, maka sesungguhnya konflik Partai Golkar seperti ini masih bisa dihindari.

Apabila munas dilakukan secara demokratis, sesuai jadwal yang disepakati pada rapat pleno DPP Partai Golkar, dan tidak dijadikan arena memecat kader dan elite Partai Golkar, maka konflik Golkar tidak perlu terjadi.

Konflik yang terjadi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi diri bagi semua kader khususnya elite Golkar, bahwa Partai Golkar tidak bisa dikelola dengan cara-cara yang jauh dari kepatutan dan kebiasaan yang terjadi selama ini di Partai Golkar. Golkar

adalah satu-satunya partai yang egaliter, demokratis dan tidak bertumpu pada personalisasi pemimpinnya.

Tradisi itu harus terus di pupuk dan disempurnakan, oleh karenanya Golkar berubah sesuai dengan tuntutan reformasi dan terus menyesuaikan diri menjadi lebih baik, menjadi partai yang demokratis, egaliter dan mendapat tempat di hati rakyat banyak.

4.2.4. Rekonsiliasi Sebelum Munas

Setelah berseteru hampir satu tahun, Partai Golkar mulai menjajaki rekonsiliasi. rekonsiliasi dimulai dengan menggelar Silaturahmi Nasional di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Jl Slipi, Jakarta Barat. Kedua kubu yaitu Partai Golkar hasil Munas Ancol dan Partai Golkar hasil Munas Bali akan menghadiri acara tersebut.

Wakil Ketua Umum kubu Ancol, Yoris Raweyai mengemukakan, silaturahmi adalah proses menuju rekonsiliasi. Dengan rekonsiliasi diharapkan pada waktunya akan melahirkan Golkar baru, yang utuh tanpa sekat dan kubu-kubuan. Rekonsiliasi ini sudah ditunggu dengan waktu yang cukup lama dan ini merupakan momen penting bagi penyatuan kembali Partai Golkar.

Proses itu sudah dimulai sejak adanya penandatanganan bersama antara kubu Bali dan Ancol yang difasilitasi kader Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Empat hal yang disepakati, salah satunya membentuk tim untuk penjangkaran Pilkada. Tim kemudian terbentuk 10 orang dari dua kubu. Tim pun akhirnya menjangring 238 kader Partai Golkar yang bisa mengikuti Pilkada

serentak pada 9 Desember mendatang. Tim telah bubar karena tugasnya memang hanya persiapan Pilkada.

Upaya rekonsiliasi bukan karena adanya putusan Mahkamah Agung, karena jika mengikuti proses hukum, konflik tidak akan pernah berakhir, maka yang paling penting adalah, bagaimana membangun komitmen bersama untuk menyelamatkan Golkar, maka pendekatan penyelesaiannya tidak mulai dari masalah hukum.

Sebagai kader Golkar Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukham, Luhut Panjaitan, juga berusaha membuka sumbatan dan hambatan di antara dua kubu. Dua kader Golkar tersebut terus memikirkan dan mencari cara penyelesaian sengketa Golkar, sampai pada akhirnya Ketum dari dua kubu yaitu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono bisa ketemu empat mata. Kedua Ketum tersebut diamanatkan untuk berpikir menyelamatkan Golkar.

Setelah mendaftarkan kepengurusan rekonsiliasi ke Kementerian Hukum dan HAM awal pekan depan, Golkar diprediksi akan segera melaksanakan rapat pleno. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham (Republika.co.id. 2016) mengatakan, rapat pleno dilaksanakan untuk mengambil keputusan soal pelaksanaan munas luar biasa, meskipun Golkar masih berharap rapat pleno dilakukan setelah keluar Surat Keputusan Pengesahan kepengurusan rekonsiliasi.

Acara rapat pleno yang sempat tertunda, dipastikan untuk mengambil keputusan soal pelaksanaan munas. Yaitu membuat pelaksanaan munas menjadi formal dengan meminta persetujuan

seluruh pengurus DPP Partai Golkar. Golkar tetap akan menggelar Munas luar biasa sesuai kesepakatan antara dua ketua umum Golkar Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang dimediasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalaupun masih ada usulan agar Munas tidak digelar setelah pengesahan SK Kepengurusan rekonsiliatif, usulan itu akan diabaikan dan patokan rapat pleno sudah jelas dari kesepakatan yang digelar 3 tokoh Golkar.

Sebagai upaya mewujudkan rekonsiliasi, Partai Golongan Karya menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, 23-25 Januari 2016. Selain membahas pola hubungan antara Golkar dan pemerintah, Rapimnas juga membicarakan penyelesaian konflik yang terjadi di tubuh partai itu. Rapimnas kali ini digelar berdasarkan kesepakatan terakhir elite partai yang telah merancang islah dari kedua kubu yang bertikai.

Sebelumnya disepakati, dan telah memasuki proses politik yang terjadi diantara kedua kubu, maka tahapan selanjutnya adalah rekonsiliasi dengan Munas. Maka sebelum Munas akan dilaksanakan Rapimnas. Rapimnas yang digelar pada waktu itu merupakan mekanisme formal sebelum dilaksanakannya Munas. *Steering Committee* Rapimnas Partai Golkar Freddy Latumahina mengatakan, pada Rapimnas malam nanti, akan dibagi sebanyak tiga komisi. Komisi organisasi, komisi program, dan komisi pernyataan politik. Komisi pernyataan politik adalah komisi yang nanti akan menjadi sorotan. Sebab, dari sini Partai Golkar akan mengungkapkan berbagai masalah kenegaraan.

Partai Golkar ingin menata kembali hubungan dengan pemerintah. Rapimnas akan menyampaikan pernyataan politik kepada seluruh masyarakat. Selain itu, Rapimnas akan membahas kemenangan Pemilihan Presiden 2019. Karenanya, Rapimnas juga ingin membangun kesolidan partai.

Peserta Rapimnas saat itu diprediksi membeludak. Karena, tidak hanya dihadiri ketua DPD tingkat satu, tetapi juga para kader Golkar dari DPD tingkat dua. Totalnya antara 2.000-2.500 kader. Rapimnas Golkar juga diikuti oleh massa kader Golkar dari delapan penjuror angin dari mulai Kosgoro, SOKSI, MKGR, AMPG, AMPI, dan unsur lainnya, ini momentum baru partai agar membawa kebesaran Golkar di kancah politik. Tempat ini sengaja dibuat sebagai ajang rekonsiliasi dan ajang persatuan Partai Golkar dari semua kubu dan pihak.

Tim Transisi Partai Golkar yang diketuai Jusuf Kalla memutuskan untuk menunggu hasil Rapimnas yang diselenggarakan Aburizal Bakrie. Tokoh Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan partainya akan menggelar rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Rekonsiliasi itu sebagai langkah persiapan menuju musyawarah nasional luar biasa.

Sesuai aturan, Munaslub akan diselenggarakan oleh DPP Golkar, bukan oleh kepengurusan hasil Munas Riau atau Bali. Selain itu, Munaslub juga dilakukan setelah adanya rekonsiliasi. Dengan rekonsiliasi, semuanya mempunyai suatu keikutsertaan, jadi tidak lihat lagi Golkar Riau atau Bali. Bagi para senior Partai Golkar yang

penting adalah persatuan. Selama ini telah ada skema penyelesaian yang berujung pada Munas. Tapi sebelum menuju ke sana, ada rekonsiliasi yang tidak sejalan dan belum dilakukan, sehingga kalau ada rapimnas harus bersama, Transparansi ini penting sekali.

Munas hanya bisa dicapai jika dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari penyelenggara, aturan yang disepakati, serta diikuti oleh peserta dari kedua belah pihak. Pelaksanaan Munas harus dilakukan secara adil, transparan, akuntabel, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih.

Proses rekonsiliasi di tubuh Partai Golkar yang ditandai dengan kesepakatan menggelar musyawarah nasional belum juga terealisasi, tanggal pelaksanaan munas masih menunggu rapat. Perkiraan pelaksanaan Munas Golkar ialah 7 Mei 2016. Tapi, rencana itu belum diputuskan melalui rapat. Waktu penyelenggaraan munas sempat berubah-ubah pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kepengurusan Munas Bali.

Meski jadwal pelaksanaan munas sempat berubah-ubah, diharapkan dalam penyelenggaraan munas Partai Golkar akan menjadi ajang pertarungan ide, bukan ajang politik uang dalam meraih jabatan. Diharapkan calon ketua umum Partai Golkar mendatang harus memiliki kriteria seperti pohon beringin, yakni berpucuk ke atas, rindang ke samping, dan berakar ke bawah.

Setelah selama lebih dari setahun Golkar dilanda konflik internal, peluang rekonsiliasi partai pun terbuka lebar. Sebagai salah satu partai besar di Tanah Air, eksistensi Golkar sangat penting.

Soliditas partai itu akan turut memberikan sumbangsiah yang besar bagi stabilitas politik nasional, yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan saat ini.

Memang sempat terjadi perdebatan di internal peserta rapimnas, apakah Golkar akan menggelar munaslub atau munas. Rapimnas Golkar akhirnya memutuskan untuk menggelar munaslub. Dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar (Pasal 30) disebutkan, musyawarah nasional (munas) adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam lima tahun. Sedangkan, munaslub adalah munas yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dewan pimpinan daerah provinsi.

Munaslub digelar jika partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa; DPP melanggar AD/ART; atau DPP tidak dapat melaksanakan amanat munas, sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Anggaran Dasar juga menegaskan, munaslub diselenggarakan oleh DPP.

Terkait konflik internal Golkar, sebenarnya masih ada satu putusan hukum yang patut ditunggu, yakni putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) atas kepengurusan sah. Jika putusan PK menyatakan kubu ARB sebagai pengurus yang sah, maka ARB berhak untuk tetap menjadi ketua umum.

Konflik internal Partai Golkar harus segera dihentikan. Selama ini, Golkar adalah partai yang mengutamakan kekaryaan. Selama

bertahun-tahun, para kader Golkar selalu memberikan sumbangsih yang besar terhadap proses pembangunan. Namun, konflik dalam setahun terakhir ini telah mengaburkan sifat kekaryaannya Partai Golkar. Sifat kekaryaannya Golkar tertutup oleh hiruk pikuk konflik internal yang seperti tak berujung.

Kehadiran dua wakil pemerintah, yakni Menkumham Yasonna H Laoly dan Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan patut dilihat sebagai keinginan pemerintah agar Golkar tetap solid. Kehadiran dua menteri itu menunjukkan dukungan yang penuh dari pemerintah terhadap rekonsiliasi di tubuh Golkar.

Pelaksanaan rekonsiliasi hendaknya mengingatkan seluruh kader dan elit Partai Golkar untuk mewujudkan Munaslub Partai Golkar sebagai ajang rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang dibangun pada Munaslub Partai Golkar adalah rekonsiliasi bulat. Namun sebelum rekonsiliasi bulat itu diwujudkan, ada tiga hal yang harus dilakukan jika menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Pertama, melaksanakan rekonsiliasi vertikal, terutama terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh Partai Golkar, yakni melaksanakan kesepakatan Rapimnas yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK, dengan demikian, Munaslub adalah bentuk penguatan terhadap dukungan yang diputuskan pada rapimnas dan bentuk penguatan itu harus dilihat implikasinya secara positif.

Kedua, rekonsiliasi secara horizontal, terutama hubungan dengan 10 partai politik. Dengan rekonsiliasi tersebut, diharapkan

bisa meningkatkan produk dari UU, dan pengawasan dari lembaga DPR, lebih dari itu, parpol secara penuh mendukung program nawacita dari pemerintahan Jokowi-JK. Ketiga, melaksanakan rekonsiliasi objektif ini, harus memperjuangkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat bermartabat dan mandiri.

Setelah ada kesepakatan dari masing-masing kubu untuk melakukan Munas, maka kalangan Poros Muda Partai Golongan Karya resmi membubarkan diri setelah tercapai kesepakatan rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, kesepakatan rekonsiliasi tersebut berhasil mengakhiri konflik dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar melalui rencana musyawarah nasional. Upaya yang dilakukan Poros Muda Golkar itu sudah berhasil menjadi kesepakatan bersama oleh semua pihak, meskipun upaya rekonsiliasi masih menyisakan persoalan penting. Persoalan penting yang dimaksudkan di antaranya masalah kepanitiaan dan peserta munas. Selain itu, menyangkut realisasi pelaksanaan munas yang demokratis, rekonsiliatif, serta berkeadilan.

Penyelesaian masalah ini dinilai membutuhkan instrumen Poros Muda Partai Golkar, namun karena telah ada kesepakatan rekonsiliasi dari kedua kubu, maka barisan Poros Muda Golkar ini sudah resmi membubarkan diri. Poros Muda Partai Golkar dibentuk saat dualisme kepengurusan DPP Golkar semakin runcing antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Dualisme pengurus ini berujung saat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

mengembalikan kepengurusan DPP Golkar ke Musyawarah Nasional Riau pada 2009.

Setelah tercapainya kesepakatan untuk melaksanakan Munaslub, dibentuklah susunan panitia Musyawarah Nasional yang mencerminkan wajah rekonsiliasi partai beringin yang sesungguhnya. Penyusunan panitia penyelenggara Munas akan menjadi titik rawan. Wajah rekonsiliasi yang sesungguhnya akan terlihat pertama kali secara konkret ada di dalam susunan panitia.

Maka patut dipertimbangkan, apakah susunan panitia yang ditetapkan nanti harus dapat mengakomodir secara adil semua pihak, yang tentu juga perlu mempertimbangkan faktor kemampuan dan kecakapan, atau akan lebih baik jika dipilih orang yang dianggap netral dan bebas dari konflik yang terjadi selama ini. Suasana rekonsiliasi dinilai penuh kekeluargaan dan persaudaraan telah ditunjukkan dalam Rapat Harian DPP Partai Golkar perdana di Jakarta .

Namun, wajah rekonsiliasi sebenarnya akan terlihat melalui susunan panitia munas nantinya. Selain itu, agar tidak ada gerakan politik selain gerakan menuju Munas. Gerakan politik berupa Musyawarah Daerah dan semacamnya yang masih mengatasnamakan kepengurusan DPP hasil Munas Bali atau DPP hasil Munas Ancol, akan menjadi hambatan serius menuju rekonsiliasi.

Terkait dengan kepesertaan munas, hendaknya DPP Hasil Munas Riau terlebih dulu merehabilitasi status kader yang dipecat di

daerah. Sehingga suara sah dalam munas mendatang murni suara hasil kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau, Artinya hak Ketua DPD yang pernah dipecat dikembalikan seperti semula dan secara otomatis kepesertaannya di Munas menjadi hidup kembali.

4.3. Munas sebagai Jalan Rekonsiliasi

Partai Golkar harus membuat perubahan jika ingin kembali mendapatkan kepercayaan publik. Perubahan itu harus dibuktikan dengan menciptakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bebas dari politik uang. selain perubahan bersih dari politik uang, Partai Golkar juga harus kembali kepada jati dirinya sebagai partai kader. Jenjang pengaderan yang mulai terabaikan harus kembali ditegakan.

Melalui Munaslub ini mestinya tidak ada lagi aroma-aroma politik uang di dalam munas. Golkar harus membangun citra partai yang bersih. Jenjang pengaderan harus digalakan kembali seperti diklat untuk para kader Partai. Upaya ini penting dilakukan untuk menciptakan kader militan dan rasa memiliki partai yang kuat. Munculnya rasa memiliki yang tinggi kepada partai akan melahirkan kompetisi yang sehat dalam dinamika yang terjadi di internal. Salah satu contohnya adalah, dengan memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya dalam pencegahan.

Golkar akan menjadi pioneer untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia karena rebranding Golkar yaitu ingin menjadi partai yang bersih. Namun agenda utama yang perlu dilakukan pasca Munas ini adalah dengan mengonsolidasikan kekuatan internal

untuk mewujudkan agenda perubahan, termasuk dalam rangka menghadapi agenda pilkada serentak 2017.

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional, Partai Golkar mengumpulkan seluruh kelompok pemuda, ormas pendiri dan organisasi sayap partai. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi. Dalam acara tersebut juga membahas proses pelaksanaan Munas.

Agung berharap dalam Munas ini, ketua umum yang terpilih benar-benar lahir dari proses yang demokratis serta tidak menggunakan pendekatan politik uang. Munas Golkar akan dilaksanakan tahun ini. Kepanitiaan Munas sendiri akan diputuskan akhir bulan Februari melalui rapat pleno Golkar.

Partai Golongan Karya, mulai Sabtu tanggal 14 Mei 2016 menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Tak hanya petinggi Partai Beringin ini yang hadir dalam perhelatan politik tersebut.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam pembukaan Munaslub Golkar tersebut. Acara partai berkuasa di era Orde Baru ini seolah menyihir perhatian perhatian publik nasional, sehingga berita lain tenggelam oleh Munaslub Golkar.

Agenda Munaslub yang paling krusial dan esensial adalah pemilihan pengurus baru untuk menggantikan kepengurusan lama di bawah sayap Aburizal Bakrie hasil Munas Bali. Munaslub sendiri dianggap sebagai solusi menghindarkan Golkar dari petaka

perpecahan menyusul munculnya dualisme kepengurusan Golkar, yakni Golkar versi Munas Ancol, Jakarta pimpinan Agung Laksono.

Secara legalitas Aburizal Bakrie memang mengantongi surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mengakui kepengurusan hasil Munas Bali. Namun, ARB yang dinilai negarawan oleh Menteri Yasonna, karena mau mengakomodasi elite kubu Agung Laksono dalam struktur kepengurusan Munas Bali, berkomitmen tetap mengizinkan digelarnya Munaslub tersebut.

Munaslub ini memang diharapkan menjadi ajang menyatukan Golkar menjadi partai yang solid seperti era Orde Baru. Arus bawah Golkar pun menginginkan adanya pembaruan dan rebranding Golkar untuk memilih satu pemimpin di antara elite partai ini yang bisa membuat suasana rekonsiliasi dan harmonis.

Artinya, lewat Munaslub ini muncul kader muda yang bisa menyatukan Golkar menjadi partai besar, modern dan kuat. Karena itu, orang nomor satu Golkar itu tidak lagi memunculkan Aburizal atau Agung Laksono dan akhirnya munculnya delapan calon ketua umum (Caketum) yang akan bertarung dalam arena Munaslub ini.

Mereka adalah Ade Komarudin yang saat ini masih menjabat Ketua DPR, Setya Novanto (mantan Ketua DPR) yang saat ini Ketua Fraksi Golkar di DPR. Juga ada Tommy Mandala Putra, bungsu mendiang Presiden Soeharto, Airlangga Hartarto (Ketua Komisi XI DPR), Prio Budi Santoso, Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel),

Mahyudin (Wakil Ketua MPR), dan Azis Syamsuddin (mantan Ketua III DPR).

Para elite bangsa ini dan juga diakui kalangan internal partai ini sendiri bahwa Golkar adalah aset bangsa. Golkar yang didirikan dengan nama Sekretariat Bersama (Sekber) 20 Oktober 1964.

Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar didirikan oleh tujuh kino utama, yakni Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan.

Golkar lahir dari sebuah kepentingan bersama bangsa untuk mencegah pengaruh meluasnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Golkar yang belum punya embel-embel partai itu didirikan untuk kepentingan bangsa demi kepentingan ideologi dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Golkar lahir dengan mengakomodasi semua elemen bangsa, dengan dasar kebhinekaan dan nasionalisme. Karena itulah, Golkar sering diidentikan sebagai rumah dan tempat berlindung bagi semua golongan masyarakat di negara ini.

Golkar lahir tidak mengenal sektarianisme, yang mementingkan satu kelompok atau golongan maupun agama. Warna

kuning Golkar adalah simbol harmonisasi dan universalitas atau umum yang konon atas saran seorang misionaris Katolik. Sebab itu, Golkar mau dibawa ke mana, adalah menjadi agenda Munaslub ini untuk mengembalikan roh Golkar ke kitta semula. Siapa yang bisa mengemban tugas mengembalikan roh Golkar sebagai bagian dari rebranding partai ini, tentunya harus mengenal sejarah awal berdirinya Golkar ini.

Untuk itu, ada dua hal yang perlu dicamkan oleh para elite dan warga Golkar yang sedang Munaslub dalam menentukan arah Golkar ke depan dan sekaligus memilih nakhoda yang baru. Pertama, siapa pun ketua umum Golkar yang akan dipilih, dia harus punya latar belakang visioner ke depan. Punya paradigma berpikir nasionalisme dengan ideologi Pancasila yang kuat sebagaimana awal tujuan Golkar didirikan.

Kedua, siapa pun ketua umum Golkar yang terpilih, harus terbebas dari persoalan dan masalah hukum di masa lalu. Sebab, kalau tidak, dia akan jadi beban Golkar dan akan menjadi bahan bulan-bulanan bagi lawan politik.

Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar hasil Munas Riau periode 2009-2015 menyatakan sikap dan saran mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional tahun ini sebagai wujud rekonsiliasi perpecahan partai beringin. Kami sudah melakukan pertemuan dan membicarakan perihal pelaksanaan Munas (Tandjung, Antara, 2016).

Dewan Pertimbangan Golkar menyepakati lima sikap menyangkut Munas itu, yakni: Pertama, Guna mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 yang tahapannya akan dimulai sekitar bulan Juli tahun 2016, yang membutuhkan konsolidasi menyeluruh dari tingkat pusat hingga daerah melalui Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Dewan Pertimbangan mendesak agar Munas diselenggarakan selambat-lambatnya pada bulan Maret Tahun 2016, untuk selanjutnya diikuti Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kedua, mendesak DPP Partai Golkar untuk segera membentuk Kepanitiaan Munas yang dibentuk memenuhi unsur rekonsiliatif dan berkeadilan dengan cara melibatkan pihak-pihak yang bertikai, melalui mekanisme organisasi yang diatur di dalam AD/ART yaitu melalui Rapat Pleno yang dilakukan secara terbuka dan demokratis, dengan senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam rapat.

Ketiga, Mengingat konflik selama ini sudah sampai pada tingkat daerah, maka di dalam menetapkan unsur kepesertaan Munas, Dewan Pertimbangan meminta DPP Partai Golkar untuk menata secara adil dan setara dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dan benar-benar mencerminkan bentuk penyelesaian konflik secara menyeluruh menuju rekonsiliasi total melalui Munas yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Sehubungan dengan itu kepesertaan di daerah juga mengacu pada Kepengurusan Hasil

Munas Riau 2012. Hal itu menjadi penting guna menghindari kembali potensi perpecahan akibat adanya ketidakpuasan.

Keempat, dalam upaya mewujudkan penyelesaian konflik dan penyatuan kembali Partai Golkar secara menyeluruh yang dicerminkan pada kepanitiaan dan kepesertaan Munas yang memenuhi unsur rekonsiliatif, maka Dewan Pertimbangan meminta DPP Partai Golkar untuk memulihkan dan mengembalikan status dan hak keanggotaan/kepengurusan seluruh kader Partai Golkar baik di pusat maupun daerah yang pernah dipecat sehingga suasana kebersamaan yang kondusif menuju Munas dapat tercipta.

Kelima, kami berkomitmen dan akan berperan aktif mencermati, mengikuti, dan mengawal seluruh proses pelaksanaan Munas mulai dari tahapan persiapan hingga berlangsungnya Munas, agar berlangsung secara demokratis rekonsiliatif dan berkeadilan dengan tujuan mengakhiri konflik dan menyatukan kembali Partai Golkar untuk dapat bangkit kembali menjadi partai yang maju dan besar, dengan prestasi-prestasi yang dapat mengangkat harkat dan martabat partai serta diperhitungkan dalam kancah politik nasional.

Kedua kubu yang berselisih sudah menyetujui Munas diselenggarakan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau, namun kubu Agung Laksono menginginkan penglibatan Tim Transisi selaku pengawas.

Sebelum dilaksanakan pemilihan Ketua Umum, Ketua Komite Pemilihan Munaslub, Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan

aturan main pemilihan ketua umum Golkar. Bila bakal calon ketua umum Partai Golkar mendapat dukungan lebih dari 30 persen (167 pemilih dari 557 pemilik suara) sebagai syarat pencalonan, sementara bakal calon lain tidak mencapai 30 persen, maka bisa langsung menjadi ketua umum.

Sebagaimana diketahui, untuk calon ketua umum, bakal calon harus mendapatkan dukungan 30 persen dukungan dari pemilih yang punya hak suara. Bila bakal semua calon mendapat dukungan kurang dari 30 persen maka diambil berdasarkan urutan 1-3. Bila hanya dua bakal calon yang memenuhi 30 persen, maka dilakukan pemilihan ulang.

Adapun agenda acara Munaslub 2016 ini adalah Para Peserta Munaslub partai Golkar mulai mengikuti agenda pertama dalam forum yang digelar di BNDCC, Nusa Dua, Bali. Berdasarkan agenda acara yang diterima, agenda pertama yaitu pengesahan tata tertib. Dilanjutkan pemilihan pimpinan Munaslub partai Golkar, dan pengesahan hasil kerja panitia pengarah (SC). Pada pukul 15.30-16.00 siang, akan dilakukan rapat paripurna II. Dalam paripurna ini, akan dilakukan laporan pertanggungjawaban DPP partai Golkar masa bakti 2014-2019. Setelah itu akan dilakukan pandangan umum.

Pada pukul 22.30-24.00 malam nanti, dilanjutkan dengan tanggapan/penjelasan DPP partai Golkar atas pemandangan umum. Setelah itu, dilanjutkan dengan pernyataan pimpinan Munaslub terhadap pertanggungjawaban DPP partai Golkar. Setelah itu,

dibacakan pernyataan demisioner DPP partai Golkar periode 2014-2015.

Dalam sesi laporan pertanggungjawaban ketua Umum Partai Golkar, laporan ARB diterima dengan baik. Bahkan beberapa DPD mengungkapkan keinginannya agar ARB dinasbihkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Suasana panas kembali terjadi di awal acara, kali ini dipicu atas boleh tidaknya menyebutkan nama salah satu calon ketua umum dalam sidang.

Munaslub jadi momentum untuk menyatukan seluruh elemen di Partai Golkar. Penyatuan itu menguntungkan tidak hanya bagi kader saja tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Begitu beratnya beban yang dihadapi kader Golkar selama satu setengah tahun ini. Hal itu tak lepas dari dualisme yang terjadi akibat perpecahan dalam Munas sebelumnya.

Dalam sesi Pemilihan Calon Ketua Umum DPD Partai Golkar, Ade Komarudin mendapat suara sekitar 173 suara. Ia pun berhak maju ke putaran dua perhelatan perolehan suara Munaslub 2016 Partai Golkar, namun, Ade memilih untuk menyerahkan tampuk pimpinan kepada Setya Novanto. Ade merasa lebih muda dibanding Setya Novanto, Ade mengucapkan selamat untuk Setya Novanto untuk kebesaran Partai Golkar. Selanjutnya Nurdin Halid memutuskan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Terpilih Partai Golkar periode 2014-2019. dalam perhitungan suara, Setya Novanto unggul sekitar 104 suara atau 277 suara dari Ade Komaruddin.

Setelah dinyatakan unggul memenangi perolehan suara tertinggi, Ketum Golkar Setya Novanto langsung membentuk pengurus inti Golkar. Novanto sudah memilih orang untuk mengisi jabatan strategis. Hal tersebut disampaikan Novanto dalam rapat penutupan Munaslub Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali. Hadir dalam acara ini Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan menutup pelaksanaan Munaslub Golkar sebagai wakil dari pemerintah.

Kemudian Setya Novanto menjelaskan bahwa, setelah diadakan rapat, pihaknya telah menentukan kader Golkar untuk mengisi jabatan strategis. Untuk formatur lainnya akan disusun dalam waktu sekitar dua pekan usai Munaslub ditutup.

Untuk Sekjenya dipilih Idrus Marham, Bendum Robert Kardinal, dan Ketua Harian Nurdin Halid. Formatur ini akan bekerja paling lambat maksimal 15 hari. Kemudian Novanto meminta Idrus, Robert, dan Nurdin untuk menampung segala masukan-masukan terkait susunan formatur atau kepengurusan Golkar. Terutama untuk mereka yang terlibat dalam Munaslub dan proses pemenangannya. Kita harapkan anggota yang betul-betul ingin aktif, tidak hanya orang yang ditaruh di tempat-tempat tapi tidak bekerja karena waktu kita hanya 3,5 tahun..

Mantan Ketua DPR tersebut berjanji untuk bekerja maksimal bagi Golkar. Yakni dengan roadshow mendatangi DPD Golkar baik tingkat I dan tingkat II. Usai memberikan pidato terakhir, sidang paripurna dilanjutkan dengan prosesi pelantikan Novanto sebagai

Ketua Umum Golkar. Nurdin Halid yang bertindak sebagai Pimpinan Munaslub memberikan panji-panji Golkar kepada Novanto.

Usai pelantikan, Nurdin menjelaskan soal formatur pengurus DPP Golkar akan dikukuhkan dalam forum Rapimnas. Pembentukan formatur DPP juga sekaligus dilakukan bersamaan dengan penyusunan formatur Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Pertimbangan. Kemudian Nurdin menutup sidang paripurna Munaslub.

Terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Umum pada Munaslub Golkar di Bali 14-17 Mei 2016 menggoreskan banyak cerita. Banyak stigma dan banyak realita. Hasil akhir Munaslub Golkar yang menimbulkan pro kontra adalah akhir dari proses eksperimen demokratisasi yang melelahkan.

Bayangkan, ada delapan kandidat Calon Ketua Umum (Caketum) yang harus mengikuti agenda kontestasi yang berpindah-pindah kota, yang relatif menggerus tenaga, waktu dan energi karena dilakukan secara maraton.

Kampanye kandidat Caketum dimulai dari Medan (8/5) untuk Indonesia bagian Barat. Disusul acara Debat Calon di Surabaya untuk bagian tengah dan terakhir di Denpasar (14/5) untuk Indonesia timur dengan acara Debat Calon. Kandidat Caketum itu adalah Ade Komaruddin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Mahyuddin, Azis Syamsuddin, Priyo Budi Santoso, Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo.

Kelebihan Setnov terhadap tujuh orang pesaingnya, karena posisinya sebagai bendahara umum partai Golkar selama hampir enam tahun, sejak terpilih pada Munas VIII Golkar di Pekanbaru, Riau 2009, yang membuatnya jadi akrab berkomunikasi dengan pengurus provinsi, kabupaten dan kota di dalam masalah pembiayaan partai.

Sudah menjadi rahasia umum, sejak terjadinya resesi dunia pada tahun 2008 yang merobohkan kerajaan bisnis properti Amerika yaitu Lehman Brothers, grup usaha Bakrie milik keluarga Aburizal Bakrie (ARB) ikut terpukul.

Apa hubungan dengan Setnov dengan kasus kolapsnya grup usaha keluarga ARB, Jelas, di saat-saat grup usaha keluarga ARB terjebak dalam awan "cumulonimbus" sektor finansial yang akut pada masa itu, maka adalah Setnov yang "terbebani" kelanjutan komitmen pendanaan reguler untuk seluruh provinsi dan kabupaten kota se Indonesia selama enam tahun.

Situasi multikrisis keuangan inilah yang membangun jembatan kedekatan batiniah antara Setnov, ARB dan pengurus Golkar di seluruh tingkatan se Indonesia. Ini yang menjelaskan mengapa Setnov dengan mudah menggapai jabatan Ketua Fraksi dan merangsek menjadi Ketua DPR RI, lalu kembali jadi Ketua Fraksi.

Kondisi kritis finansial ini yang membuat Setnov terpaksa memanggul beban, tapi dengan mudah membuka jalan untuk memanen jabatan. Bangunan komunikasi yang dibuat antara ARB dan Setnov bersama ring satunya dalam mengendalikan pengurus

Golkar daerah, adalah dengan cara membentuk Paguyuban Golkar Propinsi. Setnov dikenal luas sebagai pemilik puluhan papan atas. Sejak usia muda, sudah bermitra dengan saudara sepupu Pak Harto, yaitu Soedwikatmono. Menangani puluhan bisnis fasilitas pemerintah Orde Baru.

Dengan label sebagai pengusaha dan politis berkelas, Setnov bebas berlelgang membangun kerajaan bisnisnya. Termasuk yang banyak disebut-sebut terlibat di dalam aneka macam kasus. Termasuk perkawanannya dengan Mohammad Riza Chalid (MRC) mantan penguasa Petral dan teman Setnov ketika bertemu Ma'roef Syamsuddin. Kasus inilah yang menggelinding dengan judul "Papa Minta Saham". MRC dijuluki "Saudagar Minyak" (The Gasoline Godfather) dan dianggap mendominasi bisnis impor minyak via Petral alias "penguasa abadi bisnis minyak" di Indonesia.

Melalui eksistensi paguyuban propinsi, duet ARB berhasil menguasai permainan konstitusi di Golkar. Forum Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) yang pesertanya adalah paguyuban yang menguasai 34 DPD provinsi, dengan mudah memproduksi legitimasi penentu kebijakan nasional ARB (Bintang, 2016).

Perhelatan Munaslub Golkar "sukses" digelar dengan munculnya Setya Novanto sebagai ketua umum. menggantikan Aburizal Bakrie. Sebenarnya banyak sekali opini yang berkembang mengenai jalannya Munaslub ini. Dari mulai tempat acara, waktu acara, panitia, calon-calon ketua, isu intervensi pemerintah, sampai dengan dugaan money politik dan sebagainya, Tetapi saat ini setelah

semua hal itu selesai maka pertanyaan selanjutnya bagaimana Golkar dibawah Setya Novanto.

Figur Setya Novanto memang adalah figure kontroversial, dikenal sebagai politikus yang licin bagai belut, kepiawaian bermain politiknya sanggup mengantarkannya menjadi ketua DPR, walaupun dari dapil diluar jawa (Setya Novanto berasal dari dapil NTT). Ditambah lagi Partai Golkar adalah bukan peraih suara terbanyak pemilu legislative 2014. Tapi itulah sekali lagi dengan kepiawaian lobi - lobi dan kekuatan finansialnya maka mau tidak mau harus diakui Setya Novanto adalah politikus terbaik yang dimiliki oleh Golkar, terlepas dari berbagai isu yang menerpanya termasuk kasus “papa minta saham” yang menghebohkan itu.

Setahun kedepan perpolitikan Indonesia akan dihadapkan kepada Pilkada serentak 2017, dan didalamnya tentunya melibatkan Pilkada DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta tentunya adalah salah satu barometer keberhasilan partai politik., selain Pilpres dan Pemilu Legislatif. Begitu prestisenya jabatan Gubernur Provinsi ini sehingga gaungnya bahkan sudah dimulai sejak tahun lalu. Yang menarik tentunya adalah bagaimana sikap Partai Golkar mengenai Pilkada DKI saat ini da siapa yang akan di dukung.

Jumlah kursi Partai Golongan Karya di DPRD Jakarta memang “hanya” berjumlah 9 kursi. Masih jauh dari syarat minimal partai untuk mengajukan calon yakni 22 kursi. Tetapi dengan jaringan dan dukungan finansialnya maka dukungan Partai Golkar jelas mempunyai arti tersendiri bagi siapapun yang didukung. Karena

tidak mungkin mencalonkan Gubernur, sendiri tentunya pilihan Partai Golkar tinggal dua. Bergabung dengan partai – partai untuk melawan Ahok atau malah bersatu dengan Hanura dan Nasdem mendukung Ahok.

Menarik untuk mencermati “bahasa politik” Ahok terhadap Setya Novanto selama ini. Tidak usah jauh ingat pada waktu Setya Novanto dilanda isu “papa minta saham” tidak ada koment negative keluar dari mulut seorang Ahok terhadap Setya Novanto. Bahkan pada saat Setya Novanto mengadakan pernikahan anaknya yang pada saat itu bahkan Presiden dan Wakilnya tidak datang. Ahok datang dan dengan santainya dia jawab “ hubungan saya dengan pak SN baik – baik saja kok”. Dan beberapa hari terkahir setelah SN terpilih menjadi ketua umum Golkar Ahok juga mengatakan bahwa figure Setya Novanto adalah figur atasan yang mengayomi. Seperti yang kita tau sebelum “loncat” ke Gerindra dalam pemilihan Gubernur DKI Ahok adalah kader Partai Golkar. Dimana Ahok adalah anggota DPR dengan Setya Novanto adalah atasannya di DPR.

Satu hal yang juga perlu dicermati lagi adalah budaya politik di Indonesia yang masih terpusat kepada ketua umum partai, dimana keputusan – keputusan strategis partai adalah “hak veto” dari sang ketua umum,. Termasuk didalamnya adalah pemilihan seorang kepala daerah. Sangat jarang penentuan kepala daerah diserahkan kepada anggota. Okelah kalo proses penjaringan, seleksi dll dilakukan oleh DPP atau sejenisnya. Tetapi percayalah semua itu

nantinya akan ditentukan oleh satu orang yakni Ketua Umum Partai. Begitu juga yang penulis yakin akan terjadi di Partai Golkar. Para anggota DPRD, anggota DPP, kader boleh ngomong, boleh mengusulkan, boleh beropini, tetapi keputusan tetap di tangan ketua umum.

Melihat hal tersebut diatas dan melihat realitas dilapangan dimana Ahok masih merajai beberapa survey keterpilihan maka peluang Ahok untuk didukung Partai Golkar sebenarnya sangat besar. Apalagi saat ini Partai Golkar pastinya sedang mencari cara untuk menaikkan citra mereka di mata masyarakat. Dengan mendukung Ahok tentunya dimata sebagian besar masyarakat Jakarta Partai Golkar dianggap mendengar suara rakyat. Ditambah lagi hubungan yang baik antara Ahok dan Setya Novanto bisa jadi hal tersebut dapat diwujudkan.

Salah satu faktor lain adalah adanya dukungan “Istana” . Tidak dapat dipungkiri naiknya SN menjadi ketua umum sedikit banyak ada campur tangan dari seorang Luhut. Tentunya bukan suatu kebetulan juga kalau seorang Luhut sampai harus menginap di lokasi Munaslub untuk menjaga jagoannya menang. Dan kita tau bahwa sampai sekarang Luhut adalah salah satu orang kepercayaan dari Presiden langsung. Kalau ditarik benang merahnya tentunya banyak kepentingan yang dapat diambil akan manuver ini. dan kemenangan Pilkada DKI Jakarta 2017 pasti ada di dalamnya.

BAB V

EKSISTENSI PARTAI GOLKAR PASCA MUNASLUB

5.1. Konsolidasi Pasca Munaslub

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat menyatakan, akibat dualisme kepengurusan Golkar, jumlah pasangan calon yang diajukan Golkar turun drastis dari Pilkada sebelumnya. Jika pada saat pelaksanaan Pilkada hampir seluruh daerah Golkar mengajukan dukungan tetapi di Pilkada serentak 2015 hanya 30 persen.

Dualisme kepengurusan nyata-nyata telah menurunkan partisipasi Golkar dalam pencalonan di Pilkada. Para kader Golkar lebih memilih mendapatkan dukungan partai lain atau menempuh jalur independen.

Sebagai contoh nyata, dari 13 pasangan calon perseorangan yang memenangi Pilkada serentak, 8 diantaranya adalah kader aktif Golkar. Apa yang terjadi ditingkat pusat, berpengaruh langsung terhadap seleksi kepemimpinan daerah di tubuh partai tersebut. Masykurudin menilai tantangan utama Ketua Umum Golkar Setyo Novanto bersama jajaran kepengurusan baru adalah konsolidasi partai Golkar secepat mungkin. Bukti keberhasilan konsolidasi adalah kembalinya Golkar untuk bersatu padu dalam membagi kesempatan bagi seluruh kader untuk mengikuti Pilkada 2017. (Masykurudin Hafidz, Berita77.com 2016)

Dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin ini yang terjadi hampir 2 tahun ini harus benar-benar dibenahi.

Momentum itu dapat dibuktikan pada Pilkada serentak 2017 mendatang. Bagaimana kekuatan Golkar dapat benar-benar dimanfaatkan untuk membangun kembali soliditas internal partai dan meraih simpati pemilih.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menamakan pengurus DPP Partai Golkar periode 2016-2019 ini dengan sebutan Kepengurusan Akselerasi Kerja. Nama tersebut merupakan isyarat perlunya percepatan dalam menghadapi tahun-tahun politik pada waktu mendatang. Periode kepengurusan cukup pendek, hanya 3 tahun, sementara agenda politik sudah membentang, ada pilkada 2017, 2018, dan Pemilu 2019, serta pileg dan pilpres.

Untuk menghadapi hal itu, diperlukan percepatan kaderisasi dan konsolidasi yang masif. Hal itu bertujuan untuk transformasi modern bagi kejayaan Partai Golkar. Untuk merealisasi kejayaan tersebut, perlu mewujudkannya dengan lebih banyak bekerja nyata. Bahkan, dalam 100 hari mendatang, Setya Novanto akan pergi mengunjungi dewan pengurus wilayah maupun daerah di 34 provinsi. Kunjungan itu juga dimaksudkan untuk inventarisasi calon kepala daerah yang potensial untuk perhelatan dalam pilkada mendatang.

Untuk pertama kalinya pasca Munas, Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I di bawah kepemimpinan Ketua Umum terpilih Setya Novanto. Rapimnas yang digelar mulai 26-28 Juli 2016 ini merupakan agenda nasional pertama Partai

Golkar pascarekonsiliasi setelah didera konflik dualisme kepengurusan.

Sejalan dengan tema Rapimnas I, yakni Memantapkan konsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2019 demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, dalam pidato politiknya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berulang kali mengingatkan seluruh kader bahwa kemenangan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya konsolidasi nasional.

Kita perlu memperkuat konsolidasi organisasi melalui musyawarah daerah (musda), mulai dari tingkat provinsi sampai di tingkat kelurahan. Tidak ada kebangkitan tanpa konsolidasi, tidak ada kemenangan tanpa keberhasilan konsolidasi. (Setya Novanto. Media Indonesia, 28 Juli 2016)

Rapimnas itu dihadiri sejumlah tokoh senior Partai Golkar, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, serta Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Selain itu, elite Partai Golkar lainnya, seperti Ketua DPR Ade Komarudin, Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai, Sekjen Partai Golkar Idrus Mahram, Bendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo turut Hadir.

Pada kesempatan itu, Novanto meminta setiap pengurus daerah untuk bersungguh-sungguh bersama konsolidasi. Tidak hanya

melibatkan pengurus DPP dan DPD, demi penguatan konsolidasi, Golkar akan menggerakkan potensi organisasi masyarakat (ormas) sayap partai, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) serta ormas kekaryaannya. Bersamaan dengan dilaksanakannya konsolidasi nasional, elektabilitas Golkar membaik setelah sempat didera konflik internal berkepanjangan. Survei terakhir, posisi Golkar secara elektabilitas naik signifikan, semula 8% menjadi 15%.

Selama 69 hari menjabat sebagai Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto telah mengunjungi 17 kota di 17 provinsi. Hal itu dilakukan untuk konsolidasi partai. Dalam partai saat ini tengah terjadi transformasi ini untuk Golkar baru, modern, kuat dan solid. Selama 100 hari pertama kepemimpinannya, Setya aktif berkonsolidasi dengan semua provinsi untuk konsolidasi pilkada.

Setya juga mengunjungi jajaran pengurus Partai Golkar Provinsi NTT untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh kader Partai Golkar hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Setya melantik kepengurusan DPD Partai Golkar NTT periode 2016-2020 di kampung nelayan Lasiana, Kota Kupang, Rabu, 02 November 2016. konsolidasi itu dianggap penting untuk kembali meningkatkan elektabilitas Partai Golkar.

Setya Novanto, melakukan kunjungan juga ke Sulawesi Selatan untuk mengikuti acara halalbihalal di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum tepat bagi para kader Golkar untuk melakukan konsolidasi menjelang pelbagai momen politik pada masa mendatang. Kegiatan

itu menjadi kesempatan konsolidasi emosional bagi para kader Golkar khususnya bagi Setya Novanto.

Halalbihalal itu diperkirakan akan dipadati oleh 2 ribu orang. Mereka datang dari pelbagai elemen, di antaranya yakni sesepuh dan senior partai politik se-Sulsel, ormas, keluarga besar Partai Golkar, tokoh pemuda dan majelis taqlim. Acara halalbihalal tersebut bukanlah kegiatan baru, namun sudah rutin dilaksanakan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel sekaligus Ketua DPD I Golkar Sulsel.

Selain konsolidasi di internal Partai Golkar, Setya juga melakukan konsolidasi di eksternal Golkar. Setya Novanto mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya konsolidasi politik sebagai sesama partai pendukung pemerintah.

Ada 3 hal yang menjadi pembahasan, pertama, konsolidasi politik antara sesama pendukung pemerintah untuk menetapkan dukungan ke pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla dan memperkuat komitmen kebangsaan.

Dalam pertemuan itu, Golkar dan PAN sepakat untuk mensosialisasikan nilai kebangsaan secara masif untuk membangun karakter bangsa. Selain itu, kedua partai akan turut menjaga stabilitas politik dan keamanan politik agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

Zulkifli Hasan juga mengungkapkan bahwa, pertemuan tersebut dilakukan untuk saling mengingatkan untuk menjaga persatuan Bangsa. Terlebih dalam nuansa politik yang saat ini sedang menghangat. di tengah situasi yang agak menghangat, perlu menghadapi dengan cara-cara Indonesia, dengan nilai-nilai luhur, dengan silaturahmi, dengan saling berkunjung. Apa yang sudah dimulai oleh presiden sekarang partai juga mengikuti, saling berkunjung dan tukar pikiran.

Para pemimpin partai dan elit politik, para pejabat hendaknya mengeluarkan imbauan-imbauan yang menyejukkan dan yang mendamaikan, yang memberi rasa damai dan tenang. Jokowi selaku presiden, selalu memberi pernyataan yang membuat suasana sejuk dan teduh dan itu menjadi cara-cara terlatih yang biasa dilakukan, yaitu silaturahmi untuk menyejukkan suasana politik yang menghangat di masyarakat.

Kedua, menjaga stabilitas, persatuan agar pemerintah bisa bekerja dengan baik dan tenang, agar rakyat diuntungkan. Mereka sepakat untuk melakukan kunjungan ke para tokoh masyarakat terkait masalah politik. Nantinya, hasil pembicaraan akan menjadi masukan sekaligus sarana untuk mencari jalan keluar agar tidak memicu konflik.

Ketiga, Zulkifli mengajak MPR bersama seluruh fraksi, mengadakan pembicaraan ke para ulama, habib dan tokoh masyarakat. Kita ingin dengar tokoh-tokoh masyarakat apa pikirannya. Apabila merasa ada sumbatan-sumbatan sebagian bisa

kita tampung dengan jalur yang ada apakah DPR, pemerintah maupun aparat.

Selanjutnya Setya melakukan kunjungan ke kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bagi partai berlambang banteng, hubungannya dengan beringin rindang kini terasa lebih mesra. Pertemuan Novanto-Megawati sudah direncanakan agak lama, tapi baru terealisasi hari ini. Dialog sudah dilakukan akhir-akhir ini. Ibu Ketum, PDI Perjuangan selalu mengutamakan persaudaraan.

Golkar kembali mengubah haluan sebagai pendukung pemerintah setelah kepemimpinan Aburizal Bakrie digantikan Setya Novanto. Masuk sebagai partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, membuat komunikasi Golkar-PDIP lebih cair. Pertemuan kali ini untuk memperkuat tali silaturahmi dan Golkar sudah secara resmi dengan Jokowi dan JK.

Setya juga menginformasikan perkembangan politik yang dilakukan Partai Golkar, yaitu konsolidasi dari tingkat pusat hingga desa untuk bisa bersama sama mencari suasana damai. Baik dengan partai pendukung maupun dengan partai lain.

Silaturahmi dilakukan kepada Surya Paloh dan Megawati dan partai lain. Ini tidak lain untuk melakukan suasana untuk betul-betul kemajuan kepentingan perekonomian Indonesia yang kita harapkan dengan suasana damai maka kepercayaan yang sudah dilakukan presiden melalui program programnya dan ini sudah dipercaya oleh negara asing bisa semakin kuat. Langkah tersebut

diharapkan agar semua komponen dan partai yang ada bersama-sama memikirkan kepentingan bangsa dan akhirnya demi kepentingan kesejahteraan rakyat.

5.2. Prospek Partai Golkar

Perhelatan akbar Partai Golkar yaitu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sudah selesai digelar dan mengikrarkan Setya Novanto sebagai pemegang utama petaka partai periode 2014-2019. Setya Novanto berjaya mendapatkan suara terbanyak, yakni 277 suara.

Sedangkan tujuh calon yang lain, Ade Komarudin 173 suara, Airlangga Hartarto 14 suara, Mahyudin dua suara, Priyo Budi Santoso satu suara, Aziz Syamsuddin 48 suara, Indra Bambang Utoyo satu suara, Syahrul Yasin Limpo 27 suara dan suara tidak sah berjumlah 11, sehingga total suara 554.

Perhelatan ini diadakan pasca badai politik yang menghantam Partai Golkar, yang berakibat terbelah menjadi dua kubu. Yakni, kubu hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu hasil Munas Ancol yang dikomandani oleh Agung Laksono. Keduanya saling klaim sebagai pengurus yang sah. Berbagai cara telah ditempuh untuk menyatukan dua kubu yang berseberangan. Mulai dari melibatkan mahkamah partai, menempuh jalur hukum sampai turun gunungnya jawara-jawara Golkar tempo dulu. Hasilnya, kedua kubu tetap bersikukuh dengan pendirian politiknya masing-masing. Kendatipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang memenangkan kubu ARB, pihak yang kalah tetap

melihat celah dan berhelah dengan jubah undang-undang. Akibatnya, impian untuk bersatu dan berteduh di bawah naungan satu beringin kian jauh.

Perseteruan yang dialami Partai Golkar, tak ubahnya seperti perang yang tak jelas kapan berakhirnya. Segala strategi politik dan amunisi tercurah hanya untuk memenangkan “perang saudara”. Perang yang keuntungannya tidak seberapa, bahkan boleh dikatakan tidak ada, yang senang dan bertepuk tangan adalah lawan politik. Dinamika ini sejatinya disadari oleh Partai Golkar, namun birahi politik individu dan angin eksternal membuat kenyataan itu menjadi samar-samar dan terhibab.

Kesadaran itu kini mulai muncul, melalui Rapimnas, Partai Golkar menemukan terobosan baru dengan menggelar Munaslub sebagai upaya untuk mengakhiri konflik. Dampak konflik sangat besar pengaruhnya terhadap kredibilitas, elektabilitas dan soliditas partai, sehingga, Golkar terpuruk di pilkada serentak 2015 lalu. Dari 116 pasangan calon Partai Golkar, partai ini memenangi tidak sampai 50 persen. Untuk itu, Partai Golkar harus segera bangkit dari konflik dan menjadikan Munaslub sebagai momentum untuk membangun masa depan Partai Golkar.

Usaha untuk membangun masa depan Partai Golkar, antara lain. *Pertama*, rekonsiliasi Yakni, menyampingkan ambisi pribadi atau kelompok serta mengedepankan persatuan untuk kejayaan partai dan bangsa.

Kedua, membangun sinergitas kader. Siapapun yang terpilih dalam Munaslub harus didukung oleh semua kader Golkar. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh senior Golkar (wawancara dengan Chairuman Harahap 2016) yang menyatakan bahwa, perebutan ketua umum Partai Golkar harus berakhir, ketika ketua umum telah terpilih. Semua kubu dari calon-calon ketua umum harus bersinergi dan mengikat janji untuk memberikan kontribusi dalam membangun dan membesarkan partai ke depan. Jangan ada lagi kader yang merasa tidak cocok bernaung di bawah kepemimpinan ketua umum terpilih dan berniat membuat partai baru. Apa yang diungkapkan Miall (1999), tentang pihak yang berkonflik cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametrikal dan menghasilkan konklusi kalah-menang, haruslah dihilangkan dari setiap benak politik kader.

Ketiga, netralitas pemerintah. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tidak boleh berpihak, apalagi mengintervensi keputusan Munaslub Golkar. Selama ini pemerintah seakan “bermain” dalam perjalanan dualisme kepengurusan partai dengan mengeluarkan SK kepengurusan salah satu kubu, dan “menekan” kubu yang lain dengan argumentasi undang-undang. Buktinya, pemerintah mengalami kekalahan di pengadilan. Siapapun yang terpilih, pemerintah harus mengakui legalitasnya. Hal ini penting untuk terbangunnya sistim politik yang baik di Indonesia.

Keempat, kontribusi nyata dalam membangun bangsa dan juga alam demokrasi. Partai yang mengklaim dirinya sebagai partai kekaryaan dan tertua di negeri ini, sudah selayaknya membuktikan ke publik, bahwa Golkar bukanlah partai yang sarat dengan politik transaksional yang haus kekuasaan. Keteladanan dalam berpolitik dan berperilaku harus menjadi tolok ukur dalam merentang dan membentang tali-tali politik Golkar. Sehingga politik dijalankan dalam ruang kesadaran, bukan dalam rangka memuaskan birahi kekuasaan, dan bukan juga seperti ungkapan Niccolo Machiavelli dalam bukunya *The Prince*, politik yang menghalalkan segala cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Upaya di atas menjadi penting bagi Partai Golkar untuk membangun masa depannya. Menata kembali puing-puing yang terserak dalam perjalanan satu setengah tahun ini. Momentum Munaslub dan terpilihnya ketua umum yang baru harus benar-benar dijadikan Partai Golkar untuk melakukan muhasabah sekaligus islah agar jangan terbelah lagi. Kalau tidak, Partai Golkar akan menjadi beringin tua, yang hanya akan menjadi catatan sejarah, bahwa dulunya ia sakti mandraguna. Namun kini, kesaktiannya terenggut ambisi pribadi dan kutukan zaman. Semoga Munaslub dan terpilihnya Setya Novanto menjadikan beringin kembali teduh bagi siapa saja yang bernaung di bawahnya dan segera menyongsong masa depan yang lebih cerah.

Terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum baru, banyak kalangan yang menaruh harapan agar kisruh yang melanda Golkar

selama ini dapat segera diakhiri. Kepemimpinan Setya Novanto diharapkan mampu menjadi pemersatu bagi partai Golkar.

Jika Novanto berhasil melakukan berbagai langkah guna menyatukan kekuatan politik Golkar, maka bukan tidak mungkin, ke depan Golkar akan kembali memperoleh masa kejayaannya. Apalagi Golkar banyak memiliki kader-kader yang cukup berpengalaman dalam perhelatan politik di tanah air.

Terpilihnya ketua umum baru Golkar dinilai sebagai momentum penting untuk mengukuhkan soliditas partai setelah diterpa konflik internal, berupa dualisme kepengurusan selama lebih dari setahun.

Untuk itu, selain pemilihan ketua umum baru, agenda penting lainnya adalah bagaimana seluruh komponen Golkar mampu merumuskan kembali platform arah perjuangan partai dan mekanisme pengelolaan organisasi, agar Golkar tak mudah diguncang perpecahan. Sebagai salah satu dari partai tertua di Tanah Air, Golkar dianggap partai yang memiliki infrastruktur politik paling komplet dan cukup kuat.

Catatan sejarah menunjukkan, sejak berkiprah di pentas perpolitikan nasional pada 1971, lebih dari tiga puluh tahun perjalanannya, Golkar duduk sebagai penguasa pemerintahan. Itulah mengapa, doktrin kekaryaan masih lekat di dalam garis perjuangan partai, yakni selalu menjadi bagian dari pemerintah untuk menyukseskan pembangunan. Namun, sejarah juga membuktikan,

pasca tumbangnya rezim Orde Baru, Golkar boleh dikatakan cukup sering dilanda konflik internal.

Konflik dimaksud umumnya berpangkal dari ketidakpuasan atas proses alih kepemimpinan. Muara dari konflik itu, sejumlah tokoh Golkar melahirkan partai-partai baru yang merupakan semampulan. Se jauh ini, setidaknya ada empat partai yang masih eksis yang didirikan oleh mantan elite Golkar. Keempat partai itu adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Namun, publik juga melihat, konflik internal tak pernah membuat Golkar tersungkur. Para elite dan kader yang masih bertahan selalu mampu mengatasinya sehingga tetap eksis sebagai salah satu partai terbesar di Tanah Air. Inilah bukti nyata betapa infrastruktur politik di Golkar telah mengakar cukup dalam, sehingga tak tumbang menghadapi dinamika politik di internal.

Dengan perjalanan panjang dan pengalaman matang tersebut, Golkar merupakan aset nasional yang diperlukan dalam memperkuat politik dan demokrasi di Tanah Air. Munaslub yang berlangsung saat ini, benar-benar harus memperkuat rekonsiliasi dan peran Golkar dalam pembangunan.

Kita perlu mengapresiasi sikap yang diambil para pihak yang berseteru, yang memilih Munaslub sebagai solusi mengatasi konflik. Pasalnya, rekonsiliasi atau islah melalui Munaslub, sejatinya jalan keluar paling tepat untuk mengatasi konflik internal di sebuah

organisasi. Ketimbang upaya hukum, rekonsiliasi merupakan solusi yang sifatnya win-win solution.

Dengan rekonsiliasi, tidak ada satu pihak yang merasa kalah. Sebab, konflik diakhiri berangkat dari kesadaran masing-masing dan tanpa paksaan. Pihak yang berseteru saling mengendurkan ego, selanjutnya berpikir dan berikhtiar demi kepentingan kolektif organisasi.

Sebaliknya, jika penyelesaian mendasarkan putusan hukum, dipastikan ada satu pihak yang dimenangkan berdasarkan fakta-fakta objektif yang menjadi pertimbangan lembaga peradilan.

Putusan pengadilan tidak selamanya bisa diterima pihak yang kalah. Kondisi demikian sangat membuka peluang terjadinya perpecahan permanen, di mana pihak yang kalah memilih keluar dari organisasi induk dan membentuk organisasi tandingan. Pada akhirnya, dua pihak yang berseteru akan merugi sendiri, karena tidak sekuat saat masih bersatu. Perjalanan konflik selama setahun terakhir, tentu memberi pelajaran berharga bagi elite dan seluruh kader Golkar, bahwa perpecahan internal tidak menguntungkan partai.

Justru sebaliknya, membuka celah pihak-pihak luar untuk memperkeruh situasi konflik, dengan harapan Golkar makin terpuruk di mata publik. Munaslub Bali hendaknya dijadikan momentum untuk meneguhkan kembali kiprahnya sebagai salah satu motor demokrasi dan pembangunan bangsa.

Kehadiran parpol adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan politik dan demokrasi. Berjalannya suatu negara tak lepas dari

sebuah sistem politik dan demokrasi, yang didalamnya melibatkan parpol. Di sinilah parpol memainkan berbagai fungsi, seperti komunikasi politik, perekrutan politik, serta mengartikulasikan mandat atau kepentingan rakyat. Parpol juga memegang peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dan aturan perundangan.

Parpol juga diberi mandat konstitusional untuk merekrut calon presiden dan calon wakil presiden. Melalui wakil-wakilnya di parlemen, parpol juga turut menyeleksi calon pejabat publik sebagai pimpinan lembaga-lembaga negara. Hal itu mencerminkan pentingnya parpol dalam demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu parpol tertua di Indonesia, peran Golkar sangat diharapkan memberi kontribusi positif bagi perjalanan demokrasi di Tanah Air. Terlepas dari citra buruk parpol saat ini akibat ulah segelintir oknum elite politik, harapan munculnya parpol yang bersih dan aspiratif, jangan sampai sirna. Rekonsiliasi ini hendaknya menjadi momentum untuk membersihkan Golkar dari citra buruk yang telanjur melekat di benak publik terkait konflik internal, dan juga akibat perilaku buruk oknum kader yang telah mempermalukan partai.

Pasca Munaslub kali ini, sangat diharapkan agar Golkar mampu membangun proses kaderisasi yang baik. Para elite senior Golkar perlu membuka kesempatan bagi yang muda untuk berkiprah dalam rangka regenerasi. Golkar juga diharapkan dapat membangun masa depan yang benar-benar berkontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan semata-mata hanya memprioritaskan kepentingan para elitnya.

Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud, nakhoda baru Golkar harus mampu membersihkan partainya dari tangan-tangan kotor yang hanya memperlak parpol sebagai jalan meraup keuntungan. Masa depan Golkar jelas berada di tangan pimpinan yang baru. Jika pimpinan baru Golkar tidak mampu menyatukan dan mengakomodir berbagai kepentingan kader serta konstituennya, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa masa depan Golkar justru akan semakin suram. Namun jika mereka mampu membangun kinerja baik, maka peluang menuju parpol yang kuat dan dicintai rakyat akan semakin terbuka lebar (Suwandi, analisadaily.com. 2016)

Dua kubu Partai Golkar sepakat menyelenggarakan silaturahmi nasional (Silatnas) pasca putusan Mahkamah Agung (MA), sebagai proses rekonsiliasi ke arah persatuan partai tersebut, yang selama setahun belakangan dilanda perpecahan. Menanggapi tersebut, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengapresiasi kekuatan Partai Golkar yang terletak di soliditas internalnya. Organisasi sebesar Golkar tidak mungkin meninggalkan konsolidasi. Keutuhan dan kebersamaan di internal sangat diperlukan karena aspek ini akan menjadi indikator penting yang berpengaruh terhadap kredibilitas Golkar di mata public (Zuhro TeropongSenayan, 30 Oktober 2016).

Kekuatan partai politik berada pada kualitas kader-kadernya. Semakin kuat persatuan dalam tubuh sebuah Parpol, maka semakin

kuat untuk dipercayai masyarakat. Semakin solid dan berkualitas kader-kader partai, maka akan semakin trusted partai tersebut.

Kehadiran sesepuh Golkar di acara Silatnas sangat penting untuk ikut menyatukan kembali kader-kader atau para elite yang berkonflik. Para tokoh tersebut harus mendorong terjadinya estafeta kepemimpinan yang berkualitas, dan mempromosikan kader muda untuk menjadi calon pemimpin yang amanah.

Regenerasi merupakan sesuatu yang niscaya. Karena itu, partai sebagai organisasi politik harus membiasakan proses regenerasi tanpa harus memunculkan kekisruhan yang tak perlu.

Partai Golkar menurut hasil riset LSI menilai, perlu melakukan *rebranding* untuk mengembalikan kepercayaan publik pasca penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Golkar harus melakukan penyegaran dalam struktur kepengurusan dan program yang diusungnya. Berdasarkan survei terhadap 1200 responden di 34 provinsi, sebesar 64,5 persen setuju jika Golkar melakukan *rebranding* dari sisi formatur keorganisasian serta visi dan misi partai (Fachri Fachrudin dan Ardian Sopa dari LSI, kompas.com, 2016).

Golkar perlu *rebranding* baru dengan program dan tokoh nasional yang menjanjikan. Kedepannya, program-program yang digagas Golkar jangan hanya menjangkau simpatisannya, tetapi juga masyarakat luas. Golkar mendorong *land reform* yang sekarang belum ada bagi masyarakat. Atau memunculkan tokoh yang tidak

pernah diduga publik, kemudian Golkar mencari di berbagai daerah dan dimunculkan.

Konflik internal yang melanda Golkar lebih dari setahun belakangan ini telah berdampak pada citra partai di mata publik. Publik berharap, hasil Munaslub akan melahirkan Golkar yang baru. Yang tidak konflik, yang memunculkan ide-ide segar dalam gagasan, tokoh-tokoh baru, dan lain sebagainya.

Munaslub Golkar menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum periode 2014-2019. Keputusan ini diambil setelah Ade Komarudin yang seharusnya bertarung melawan Setya di pemilihan putaran kedua, mengundurkan diri. Pasca penetapan, Setya menyatakan akan fokus melakukan konsolidasi partai ke daerah-daerah. Perubahan posisi politik Golkar sebagai salah satu partai pendukung pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Menjaga keutuhan dan soliditas partai merupakan prioritas yang terus diupayakan dan diwujudkan oleh para kader, fungsionaris dan para sesepuh Golkar. Para sesepuh Partai Golkar menginginkan konflik tersebut segera diatasi tidak berlarut-larut dan menggantung, karena masih banyak agenda-agenda yang harus dipersiapkan menuju kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2019. Sebagai upaya mendukung pencarian solusi tersebut, maka semua pihak harus dapat menahan diri dan dapat duduk bersama untuk melakukan dialog.

Eksistensi Golkar merupakan harapan bagi para kader Golkar sendiri, karena akan berkaitan dengan kepentingan masa depan kader itu sendiri, maupun untuk kepentingan masa depan masyarakat, bangsa dan Negara ini. Selama bertahun-tahun para kader ditempa dan berinteraksi, bahkan mendapatkan rezeki, kedudukan dan banyak hal lagi yang telah diperoleh dari Golkar, maka wajar kalau rasa memiliki terhadap partai ini begitu besar, sehingga mereka memiliki keinginan kuat untuk menyatukan partai Golkar yang sudah retak.

Konflik Golkar muncul berasal dari Perbedaan tarikan kepentingan politik Pokok persoalan yang digugat kubu Munas Ancol adalah ketidakmampuan Golkar mengusung calon presiden

ataupun wakil presiden sendiri. Jusuf Kalla sebagai kader Golkar justru diusung partai lain, Golkar sendiri malah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang kalah oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla

Penyebab lain adalah adanya spirit pragmatisme partai yang kuat kepada kekuasaan politik dan lemahnya ideologisasi parpol di tengah kuatnya sistem demokrasi yang dikembangkan para kader Golkar menjadi titik lemah partai beringin, ditambah lagi dengan campur tangan kepentingan pemerintah yang ingin memperbanyak dukungan partai politik.

Langkah pertama yang dilakukan Setya Novanto pasca Munaslub 2016 adalah melakukan konsolidasi secepat mungkin baik di internal maupun eksternal Partai Golkar. Konsolidasi akan dianggap berhasil bila Golkar kembali bersatu padu dalam membagi kesempatan bagi seluruh kader untuk mengikuti Pilkada 2017.

Partai Golkar diprediksi akan kembali menjadi partai besar apabila para kadernya mampu menjaga keutuhan partai dan melakukan *rebranding* untuk mengembalikan kepercayaan publik pasca penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Golkar harus melakukan penyegaran dalam struktur kepengurusan dan program yang diusungnya.

6.2. Saran

Partai politik merupakan aset penting bangsa, karena partai politik merupakan kendaraan politik bagi orang yang akan berkuasa di negeri ini. kekuasaan harus lahir dari partai yang memiliki

kredibilitas dan integritas moral yang bagus dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Eksistensi partai politik akan terjaga manakala para kadernya mampu mempertahankan keutuhan dan soliditas internalnya, saling menyadari dan memberikan toleransi terhadap kesalahan orang lain, serta menghargai setiap perbedaan. Penelitian tentang komunikasi politik partai Golkar ini, bermaksud memberikan kontribusi berupa saran yang bersifat teoritis dan praktis dan diharapkan dapat berguna.

Penelitian tentang konflik dan rekonsiliasi partai, masih terbuka kemungkinannya untuk ditindak lanjuti dengan tinjauan dari aspek ataupun objek partai yang lain, karena ranah kajian komunikasi politik ini begitu luas, sehingga masih banyak aspek-aspek lain yang belum tersentuh. Penelitian tentang konflik dan rekonsiliasi partai ini penting dan perlu untuk ditindak lanjuti, karena penelitian ini akan memberikan pelajaran bagaimana cara mengatasi konflik yang muncul dalam suatu partai politik, sehingga dapat mempertahankan eksistensi partai dan kembali merebut kepercayaan masyarakat.

Konflik-konflik yang muncul di beberapa partai politik, sesungguhnya bukan berarti tidak bias diatasi dan disatukan kembali, namun bagaimana seluruh komponen partai memiliki kemauan untuk melakukan konsolidasi secara terbuka dan kesadaran yang tinggi diantar para kader.

Bagi Partai Golkar sendiri semangat rekonsiliasi ini perlu dijaga dan dikoreksi supaya tidak menyimpang dan memicu

kembalinya bibit-bibit perpecahan. Rekonsiliasi hendaknya dilakukan dengan menunjukkan kesalahan struktural dan kesalahan kultural, yakni kesalahan yang ditunjukkan dalam kegiatan organisasi partai dan kesalahan yang ditunjukkan dalam perilaku kader secara individu dalam komunitas masyarakatnya, untuk menumbuhkan kepercayaan dan simpati masyarakat, maka Golkar harus membuktikannya dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat dan perilaku terpuji yang harus selalu ditunjukkan oleh kader-kader Golkar. Potensi-potensi yang selama ini dimiliki Golkar tidak akan banyak berarti dalam masyarakat, apabila tidak ditunjang dengan i'tikad baik dan moralitas kadernya.

Agenda rekonsiliasi hendaknya diterapkan secara konsisten, sudah saatnya Partai Golkar berupaya secara serius menghapuskan praktek-praktek politik uang dalam berbagai agenda pemilihan para pimpinannya mulai tingkat pusat sampai daerah. Apabila Golkar masih tetap terbelenggu dengan kepentingan politik instant, hanya mengejar jabatan dan uang, maka Golkar akan kembali jatuh ke dalam kubangan pragmatisme, yang justru akan menghancurkan eksistensinya yang selama ini dipertahankan dan diperjuangkan dengan susah payah.

Kemandirian Partai Golkar mejadi dipertanyakan ketika Golkar tidak punya keberanian secara tegas mengambil posisi di luar lingkaran kekuasaan dan berdiri tegak sebagai partai oposisi, perpecahan di Golkar justru dipicu karena sikap politik yang menjadikan Golkar tidak memiliki kekuasaan. Golkar harus belajar

menghadapi realitas politik dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat, bila rakyat membutuhkan Golkar untuk berposisi sebagai penyeimbang kekuasaan, maka Golkar mestinya mendahulukan kepentingan rakyat dari pada mendahulukan kepentingan jabatan dan partainya.

Soliditas Golkar yang sempat terganggu, sehingga memunculkan petkaian antar tokoh Golkar tidak bisa terelakan, padahal tokoh-tokoh senior tersebut merupakan aset berharga bagi Partai Golkar, maka kepengurusan Golkar saat ini hendaknya berupaya menyatukan kembali dengan cara melakukan konsolidasi, mengadakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan mengajak kembali untuk memikirkan kepentingan Golkar yang merupakan aset bangsa yang harus dijaga eksistensinya. Kepengurusan Golkar saat ini juga harus memperhatikan masukan-masukan dari tokoh-tokoh tersebut, tidak jalan sendiri apalagi memaksakan kehendaknya dalam setiap pengambilan kebijakan.

Golkar harus menjaga terhadap keutuhan partai, sehingga para pengurus pusat hendaknya lebih rajin lagi untuk memantau atau turun ke daerah-daerah untuk melihat perkembangan partai dalam melakukan konsolidasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh pengurus daerah.

Sebagai partai yang responsif dan berakar, maka Golkar harus peka terhadap dinamika masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama kalangan bawah. Golkar harus hadir setiap masyarakat membutuhkan, sehingga akan

timbul kepercayaan dan simpati masyarakat yang diharapkan akan menuai kemenangan Pemilu pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bloomsbury Reference Book. 2004. *Negotiate Sccessfully*. London: Bloomsbury Publishing.
- Abdullah, Irwan. 2007. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar. 2003. Jakarta: DPP Partai Golkar.
- Almond, Gabriel and G Bingham Powell. 1976 *Comparative Politics: A Developmental Approach*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Company
Among Five Traditions. London: SAGE Publications
- Antaranews.com. (2019). MS Hidayat Mundur Demi Keutuhan Golka. <http://www.antaranews.com/berita/466986/ms-hidayat-mundur-demi-keutuhan-golka>
- Anwar, Ali. 2004. *Dinamika Pemikiran Elit Politik NU: Menelusuri Tipologi gagasan Para Elite Partai Politik di Lingkungan NU*. Disertasi pada Departemen Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana Unpad. Bandung.
- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam Politik: Strategi Pemenangan Pemilu dalam Persepektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Aritonang, Burhanudin dan Muslim Hutasuhut (ed.). 2003. *AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar*. Jakarta: DPP Partai Golkar dan Pustaka Pergaulan.
- Basrowi dan Sukidin, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendekian.
- Bertrand L. Alvin 1967. *Basic sociology: an introduction to theory and Methode*. New York: Apleton Century Crofts
- Bisnisjakarta.co.id. (2016). <http://bisnisjakarta.co.id/2016/04/11/aziz-syamsuddin-dan-syahrul-limpo-sepakat-jaga-keutuhan-golkar/>
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas terbuka.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cohen, Steven P. 2007. *Negotiate Your Way to Success: 24 Steps to Building Agreement*. New York : McGraw-Hill.

- Combs, James E & Dan Nimmo, 1981. *A Primer of Politik*. New York: Macmillan Publishing Company.
COSMOS Corporation
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing*
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln. (ed). 1994, *Handbook of Qualitative Research*. New Delhi India: Sage Publications. Inc.
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan Dariyatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Onong Uhyana. 1986. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya
- Fatah, Eep Saefulloh. 2000. *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Idiologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia
- Giddens, 1979. *Central Problem in Social Theory*. London: Macmillan.
- Giddens, Anthony and Jonathan Turner. 2008. *Social Theory Today*. Terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harmoko. 1997. *Golkar Membangun untuk Rakyat*. Jakarta: Departemen PENBITMASMED DPP GOLKAR.
- Hasil Keputusan Rapimnas I Partai Golkar di Jakarta tanggal 17-19 Oktober 2010.
- Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009 “Suara Golkar, Suara Rakyat”. Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, tahun 2009.
- Hasil Rakernas Partai Golkar 2010 “Suara Golkar Suara Rakyat” Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tahun 2010.

- Hatta, Mohammad. 2000. *Perlukah Partai Golkar Merumuskan Idiloginya Sendiri ?*. dalam Ramli HM Yusuf. (editor). *Golkar Abad XXI*. Jakarta: Pustaka LASPI.
- Hiadayat, Deddy N. 1999. *Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi* dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, VolIII. Jakarta: IKSI dan ROSDA.
- Horton, Paul B dan Chester L Hunt, 1989. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Kaid, Lynda Lee & Christina Holtz-Bacha, 2008. *Encyclopedia of Political Communication*. Volume 1 & 2. California: SAGE Publication.
- Kantaprawira, Rusadi. 1994. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Kholil, Makrum. 2009. *Dinamika Politik Islam Golkar di Era Orde Baru*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kompasiana.com. (2016). Atas Nama Kepentingan Elit Golkar, Munaslub Bisa Batal. http://www.kompasiana.com/maya21/atas-nama-kepentingan-elit-golkar-munaslub-bisa-batal_56e7ad3cc623bdca1141a843
- Kumpulan PO, Juklak dan Keputusan DPP Partai Golkar 2009-2015. Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tahun 2010.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. 2008. *Theories of Humman Communication*, Ninth Edition. Belmont USA: Thomson Wardsworth.
- McNair, Brian. 2003. *An Intriduction to Political Communication*. New York - London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. *Qualitatif Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, Lexy.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin, Yahya. 1993. *Persoalan-Persoalan Pembangunan Politik dan Demokratisasi di Indonesia*. dalam M.Amien Rais (penyunting). "Golkar dan Demokratisasi di Indonesia". Yogyakarta: PPSK

- Muhtadi, Asep Saeful, 2004. *Komunikasi politik NU: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta: LP3S.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2008. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oliver, David. 2006. *How to Negotiate Effectively*. Second edition. London and Philadelphia: Kogan Page
- Pace, R. Wayne and Don F. Faules, 1998. *Komunikasi organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Terjemahan Deddy Mulyana, Bandung: Rosda Karya.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKiS
- Pemetaan Organisasi Kemasyarakatan Yang Mendirikan dan Didirikan Partai Golkar. Koordinasi Bidang Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan DPP Partai Golkar
- Piliang, Indra Jaya. (2016). <https://www.selasar.com/politik/kmp-dan-konflik-golkar>. 30 November 2016.
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raho, Bernard, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Republika.co.id. (2016). Rapat Pleno Digelar sebelum Pengesahan Kepengurusan Rekonsiliasi. [/http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/04/02/o4yune330-rapat-pleno-digelar-sebelum-pengesahan-kepengurusan-rekonsiliasi](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/04/02/o4yune330-rapat-pleno-digelar-sebelum-pengesahan-kepengurusan-rekonsiliasi)
- Roni, Heriyandi. 2006. *Demokratisasi Internal Partai Golkar Pasca Orde Baru (1998-2004)*. Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.

- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2002. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Soemarno AP. 2002. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto, 2005. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemirat, Soleh dkk, 2000. *Komunikasi Persuasif*. Jakarta: Universitas Terbuka Depdiknas.
- Sudewo, Alief. (2006), *Partai Golkar di Era Reformasi: Strategi dalam Menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2004*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta
- Suryaningtyas, M. Toto. (2016). Merunut Sejarah Konflik Partai Golkar. <http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/01/13/Merunut-Sejarah-Konflik-Partai-Golkar> 13 Januari 2016 12:57 WIB.
- Syam, Nina Winangsih. 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: Humaniora.
- Tandjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tomsa, Dirk. 2008. *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in The pos Soeharto-era*. New York: Routledge.
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wordpress.com. (2014). <https://ferdfound.wordpress.com/2014/11/28/akbar-tanjung-akan-ambil-langkah-demi-keutuhan-partai-golkar/>. 13.33. 27 Oktober 2016.
- Yin, Robert K. 1989. *Case Study Research Design and Methods*. Washington:

Surat Kabar

Berita Antara

Harian Fajar

Jawa Pos

Kompas

Rakyat Merdeka

Media Indonesia

Pikiran Rakyat

Pelita

Suara Karya

Surabaya Pos

Solo Pos

Suara Merdeka

Suara Pembaharuan

Seputar Indonesia

Surya

Tribun